

EDISI KESEPULUH  
TAHUN 2025

PUBLIKASI LNSW  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI





# LNSW

LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

 [www.insw.go.id](http://www.insw.go.id)

 [LNSWKemenkeu](#)

 [officialinsw](#)

 [Lembaga National Single Window](#)



"Dengan Indonesia  
National Single  
Window, maka kita  
membuat satu *entry*  
untuk semua  
kementerian/lembaga  
sehingga sangat  
memudahkan para  
pelaku usaha."

**SRI MULYANI INDRAWATI**  
Menteri Keuangan RI



# INSW Percepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



## DAFTAR ISI

### 10-33 KEBIJAKAN MAKRO YANG BAIK

#### Dwelling Time Apik Daya Saing Ciamik

Di tengah deru ekonomi global yang semakin kompetitif, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia menjadi simpul strategis yang menghubungkan negara ini dengan dunia. Pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak hanya berperan sebagai gerbang perdagangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.



HLM 30-33

### 34-53 MOBILISASI PENDAPATAN

#### Pikat Investor dengan Aplikasi Sistem KEK

Penerapan Sistem Aplikasi KEK telah terbukti berkontribusi nyata untuk peningkatan ekonomi nasional, yaitu dengan secara tidak langsung membantu mendorong pembukaan kawasan-kawasan ekonomi khusus baru di Indonesia.



HLM 42-47

### 54-65 GLOBAL LEADERSHIP

#### Indonesia Sebagai Rujukan Pembelajaran Konsep Single Window

LNSW sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi perdagangan domestik, tetapi juga aktif berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan berbagai negara melalui forum internasional.



HLM 62-65

### 66-82 SERBA-SERBI

#### Loud Budgeting, Hilangkan Gengsi demi Atur Keuangan

Di era masifnya penggunaan media sosial yang selalu memunculkan hal-hal baru, pada awal tahun 2024, mencuat suatu tren di bidang keuangan, yaitu *loud budgeting*. Istilah ini ramai diperbincangkan, khususnya oleh kalangan Gen Z, melalui video-video di platform media sosial TikTok.

HLM 76-77



## SUSUNAN REDAKSI

### Pengarah:

Oza Olavia

### Pemimpin Redaksi:

Mira Puspita Dewi

### Wakil Pemimpin Redaksi:

Barri Jatimaihantoro

### Redaktur:

Amelia Arfah

### Editor:

Hera Khaerani

### Sekretaris:

Dwi Hari Murti Ningsih

### Kontributor:

Amirudin, Arkan Fanega, Azzah Ratul Azizah, Cecilia Eny Pratiwi, Desty Arini, Elok Bakti Pratiwi, Hera Khaerani, Ibrahim Ghozi Baisa, Mochammad Rama Septianto Putro, Muh. Fadli Budiman, Nindy Ellika Maharani, Rotua Nuraini Tampubolon, Syahrul Ramadhan.

### Alamat Redaksi:

Gedung Syafrudin  
Prawiranegara II, Jl. Lapangan  
Banteng Timur No.2,  
RT.9/RW.4, Pasar Baru,  
Kecamatan Sawah Besar,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta,  
10710.

### Email:

inswmagz@insw.go.id

Majalah ini dapat diakses  
secara digital melalui  
[www.insw.go.id](http://www.insw.go.id)

## DARI REDAKSI



**Oza Olavia**

*Kepala LNSW*

# Upaya Kolektif Mewujudkan Transformasi

**D**i tengah arus perubahan global yang terus melaju dengan pesat, transformasi ekonomi telah menjadi kebutuhan mutlak yang tak terhindarkan. Inklusivitas dan keberlanjutan merupakan fondasi krusial agar transformasi ini memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan transformasi ekonomi yang juga merupakan salah

satu pilar utama Asta Cita, implementasi Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) telah memainkan peran sentral dalam menyederhanakan proses ekspor, impor, dan logistik, sekaligus meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan publik.

Pada edisi ke-10 kali ini, *LNSW Magz* mengusung tema besar “INSW Percepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini menggambarkan langkah-langkah

strategis yang telah diambil LNSW dalam mendukung pencapaian transformasi ekonomi nasional. Edisi ini juga menghadirkan ulasan mendalam tentang berbagai kebijakan, inovasi, serta pencapaian dalam upaya mengintegrasikan layanan lintas sektor melalui SINSW yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim redaksi atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyusun majalah ini. Tidak lupa, kami juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan edisi mendatang.

Semoga *LNSW Magz* edisi ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang bermanfaat, tetapi juga mampu menginspirasi para pembaca untuk terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selamat membaca! ■









Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara, Rabu (18/12/2024).



Foto udara kapal melakukan bongkar muat gas  
di Terminal LPG Tanjung Sekong,  
Kota Cilegon, Banten, Jumat (19/7/2024).





# Benarkah INSW Bisa Jadi Salah Satu Solusi Atas Tingginya ICOR?

Oleh  
**Hera Khaerani**

**P**ADA saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (10/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih tingginya skor ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Indonesia yang saat ini menyentuh angka 6, melampaui angka ICOR beberapa negara tetangga. Skor tersebut menjadi salah satu tolok ukur yang menunjukkan betapa tidak efisiennya perekonomian Indonesia.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpandangan, efisiensi melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang menghilangkan repetisi dan kompleksitas, sangat relevan sebagai salah satu solusi atas tingginya angka ICOR yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Hal itu ia utarakan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW (Indonesia National Single Window), pada Kamis 12 Desember 2024, di Ruang Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sebanyak 21 kementerian/lembaga anggota dari Dewan Pengarah INSW dan yang sudah terintegrasi dengan SINSW, hadir dalam rakor tersebut.

Sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah, Menkeu pada kesempatan itu melaporkan tentang bagaimana INSW terus melakukan perbaikan dan transformasi. “Proses transformasi digital melalui Indonesia National Single Window ini kalau digambarkan secara sederhana, dulu masing-masing kementerian/lembaga memiliki proses sendiri-sendiri, semua pelaku ekspor/impor harus datang ke masing-masing instansi. Dengan Indonesia National Single Window, maka kita membuat satu *entry* untuk semua kementerian/lembaga sehingga sangat memudahkan para pelaku usaha.”

## Sejarah Pendirian INSW

Melihat kembali ke awal tahun 2000, ada keresahan yang sama di antara para pelaku ekonomi dunia. Kala itu, pelaku usaha masih harus menghadapi banyaknya perizinan yang harus diselesaikan dan administrasi dokumen yang harus diurus, tingginya biaya, kurangnya informasi, banyaknya pintu pelayanan, serta lamanya barang di pelabuhan dalam proses pengurusan (*dwelling time*). Keresahan itu juga menjadi perhatian kesepuluh negara anggota ASEAN.

Kesadaran akan perlunya simplifikasi

prosedur pengurusan perizinan barang ekspor-impor tersebut lantas mendorong diterkannya Declaration of ASEAN II (Bali Concord II), pada KTT ke-9 ASEAN yang berlangsung 7 Oktober 2003. Melalui Bali Concord II, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju Masyarakat ASEAN yang terdiri atas tiga pilar, yakni Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC), Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC), dan Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Ketiga pilar Masyarakat ASEAN itu terikat erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama yang abadi.



Dengan Indonesia National Single Window, maka kita membuat satu *entry* untuk semua kementerian/lembaga sehingga sangat memudahkan para pelaku usaha.”

**Sri Mulyani Indrawati**  
Menteri Keuangan

Semangat serupa juga secara tegas tercantum pada Vientiane Action Programme yang ditandatangani di Vientiane, Lao PDR, pada 29 November 2004. Di dalamnya terdapat program-program yang akan dilakukan oleh ASEAN pada kurun 2004–2010.

Secara khusus, di bab mengenai ASEAN Economic Community perihal perdagangan barang tertulis bahwa terkait dengan kepabeanaan, perlu dilakukan integrasi struktur kepabeanaan di negara-negara ASEAN untuk membentuk



lingkungan kepabeayan yang selaras, serta menyiapkan komitmen untuk fasilitasi perdagangan. Strateginya mencakup pembangunan *single window* regional guna memodernisasikan prosedur dan praktik kepabeayan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan kepabeayan melalui kerja sama dengan kementerian dan pelaku usaha terkait.

Tidak berhenti sampai di situ, pembangunan ASEAN Single Window semakin dipertegas urgensinya melalui penandatanganan Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window, di Kuala Lumpur, pada 9 Desember 2005. Batas waktu penyelesaian pembangunan *single window* di setiap negara anggota ASEAN pun ditetapkan.

“Negara Anggota harus mengembangkan dan mengimplementasikan National Single Window pada waktu yang tepat untuk pembentukan ASEAN Single Window. Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura akan mengoperasikan National Single Window masing-masing paling lambat tahun 2008. Kamboja, Lao PDR, Myanmar, dan Vietnam akan menjalankan National Single Window masing-masing, paling lambat tahun 2012.”

Dengan ketegasan batas waktu itu, Indonesia tidak punya alasan untuk tidak membentuk *national single window* (NSW). Jadi, selain ada dorongan kebutuhan di dalam negeri untuk menata layanan publik, ada juga dorongan kesepakatan internasional.

Pada praktiknya, fondasi berupa kesepakatan internasional saja tidak cukup. Diperlukan payung hukum untuk mendasari pembentukan NSW di Indonesia, sistem untuk menjalankannya, juga orang-orang yang akan mengawal pembentukan NSW di Tanah Air. Hal yang sama juga menjadi isu yang harus diperjuangkan di negara-negara anggota ASEAN lain dalam membangun NSW di negara masing-masing.

#### Capaian INSW

Kini, 14 tahun sejak pembentukan



FOTO: BPMI SETPRES/MUCHLIS JR

INSW, penerapan INSW dan SINSW telah terbukti menghasilkan efisiensi. Capaian INSW antara lain terlihat dari implementasi perizinan ekspor dan impor yang berdasarkan survei Prospera pada tahun 2023, menghasilkan efisiensi waktu hingga 56,4% dan efisiensi biaya 97,8%. Sementara itu, integrasi layanan ekspor dan impor dalam proses *clearance* barang impor dan ekspor yang memerlukan tindakan karantina dengan proses pemeriksaan fisik bersama (*joint inspection*), menghasilkan efisiensi waktu sebesar 73,4% dan efisiensi biaya 46,1%.

Selanjutnya, integrasi layanan angkutan barang menghasilkan efisiensi waktu sebesar 21,6% dan efisiensi biaya 45,5%. Di sektor mineral dan batu bara (minerba), digitalisasi alur dari produksi sampai penjualan batu bara juga dilakukan secara terintegrasi melalui SINSW.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (10/12/2024). Acara diawali laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai alokasi anggaran untuk tahun 2025. Dalam laporannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2025 merupakan APBN yang disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2024.

Hal ini memudahkan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga minerba. Hingga November 2024, tercatat penerimaan PNBP batu bara mencapai Rp52,9 triliun.

Dalam konteks perdagangan internasional, integrasi NSW antarnegara dalam pertukaran dokumen elektronik terkait perdagangan internasional menunjukkan efisiensi waktu yang signifikan. Rata-rata waktu pengiriman dokumen e-ATIGA adalah 7,2 menit. Kemudian, efisiensi proses juga terlihat melalui penerapan integrasi layanan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proses pelaksanaan dan penyusunan Neraca Komoditas melalui Sistem Nasional

Neraca Komoditas (SINAS NK).

Di sisi lain, Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu yang bertugas mengelola INSW dan menyelenggarakan SINSW kerap diminta memberikan pengetahuan dan asistensi untuk pengembangan NSW negara-negara lain. Termasuk di antaranya adalah Kamboja, Lao PDR, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, Tanzania, perwakilan anggota International Maritime Organization (IMO), dan perwakilan Negara Selatan-Selatan. Fakta bahwa Indonesia menjadi tempat belajar NSW ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, layak memperoleh apresiasi. ■





# Jejak Baru Birokrasi Bersih: Aksi Neraca Komoditas dan SSm Perizinan

Oleh  
**Elok Bakti Pratiwi**

**K**ORUPSI ibarat hantu gentayangan yang terus mengintai berbagai sektor kehidupan kita. Momok klasik yang tak kunjung hilang dari negeri ini. Dari berita utama hingga bisik-bisik di warung kopi, kisah tentang suap, pungutan liar (pungli), hingga praktik curang lainnya terus saja menghiasi ruang publik. Namun, tunggu dulu! Di balik cerita-cerita itu, ada kabar baik yang muncul. Pemerintah tentu terus berupaya memberikan pelayanan publik yang terbaik, antara lain dengan menggandeng teknologi dan inovasi kebijakan untuk menutup celah-celah korupsi. Salah dua pendekatannya yang mencuri perhatian adalah penerapan Neraca Komoditas dan Single Submission (SSm) Perizinan.

Kedua sistem ini disebut-sebut sebagai *game-changer*

dalam upaya melawan korupsi. Bagaimana tidak? Dengan transparansi dan efisiensi yang ditawarkan, praktik licik seperti *mark-up* data hingga pungli dalam proses perizinan bisa dikurangi secara drastis.

## Apa itu Neraca Komoditas?

Coba bayangkan ini: sebuah platform yang bisa memperlihatkan data lengkap tentang produksi, distribusi, hingga konsumsi berbagai komoditas strategis di Indonesia. Itulah konsep Neraca Komoditas.

Neraca Komoditas menjadi semacam GPS bagi pemerintah dalam memantau pergerakan bahan baku penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lainnya.

Begitu banyak manfaat Neraca Komoditas ini, salah satunya adalah transparansi data. Bayangkan jika semua angka dan informasi tersedia di satu tempat, peluang oknum-oknum curang untuk memalsukan laporan atau bermain-main dengan data jadi semakin kecil, bahkan hilang.

## SSm Perizinan: Izin Jadi Antiribet

Pernah mendengar tentang kisah rumitnya mengurus izin? Tumpukan dokumen, bolak-balik ke kantor ini dan itu, bahkan “uang pelicin” yang seolah menjadi rahasia umum. *Single submission* hadir untuk memangkas kerumitan itu.

Dengan kehadiran Single Submission Perizinan, proses perizinan kini serba *online* dan terintegrasi. Semua dokumen bisa diunggah melalui satu platform, dan semua prosesnya dilakukan secara transparan. Tidak ada lagi tatap muka antara pemohon izin dan pejabat yang rawan “transaksi gelap”.

Keunggulan lainnya adalah pelacakan status *real-time*. Jika sebelumnya kita hanya bisa pasrah menunggu kabar dari petugas, kini kita bisa memantau langsung sampai mana proses pengajuan izin kita berjalan. Jika ada keterlambatan

atau hambatan, semuanya tercatat jelas.

## Mengapa LNSW di Balik Proyek Ini?

Mungkin banyak yang bertanya, mengapa Lembaga National Single Window (LNSW) yang dipilih untuk mengembangkan dua sistem ini dan bukan lembaga lain? Jawabannya cukup sederhana: LNSW memiliki pengalaman panjang dalam menyelenggarakan Sistem Indonesia National Single Window, platform digital yang mengintegrasikan proses ekspor-impor. Dengan portofolio seperti itu, LNSW jadi pilihan paling logis untuk memimpin pengembangan dua sistem ini.



Begitu banyak manfaat Neraca Komoditas ini, salah satunya adalah transparansi data. Bayangkan jika semua angka dan informasi tersedia di satu tempat, peluang oknum-oknum curang untuk memalsukan laporan atau bermain-main dengan data jadi semakin kecil, bahkan hilang.”

LNSW juga dikenal piawai dalam menjembatani berbagai kementerian dan lembaga. Ini penting, karena Neraca Komoditas dan SSm Perizinan membutuhkan kolaborasi lintas instansi.

## Perombakan Besar di Balik Layar

Mengubah sistem yang sudah mengakar selama puluhan tahun tentu bukan pekerjaan yang mudah. Transformasi kelembagaan menjadi langkah yang





krusial. LNSW melakukan beberapa hal. Misalnya, mendigitalisasi proses yang semula manual yang membuat langkah ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meminimalisasi peluang manipulasi data.

LNSW juga melakukan integrasi sistem lintas instansi guna menghubungkan berbagai pihak dalam satu ekosistem sehingga tidak ada lagi tumpang tindih data atau proses yang tidak selaras.

#### **Efek Domino**

Efek domino dari hadirnya dua sistem yang memberikan transparansi dan efisiensi ini tidak hanya terasa di level individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik nasional.

Kita tahu bahwa salah satu masalah besar dalam pemberantasan korupsi adalah minimnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan hadirnya Neraca Komoditas dan SSs Perizinan, kepercayaan tersebut mulai meningkat kembali.

Publik bisa melihat data komoditas secara terbuka sehingga mengurangi kecurigaan terhadap permainan data yang biasa terjadi di balik layar. Para pelaku usaha pun bisa mengurus izin tanpa harus antri panjang atau “bernegosiasi” dengan petugas. Hasilnya, mereka bisa percaya bahwa sistem ini benar-benar adil dan efisien.

Melalui Neraca Komoditas, pemerintah dapat mengontrol ketersediaan barang strategis, mencegah lonjakan harga, dan mengelola kebutuhan impor dengan tepat. Hal tersebut akan menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil.

Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan sistem berjalan dengan adil, risiko keresahan sosial akibat ketidakpuasan bisa ditekan. Stabilitas politik pun lebih terjaga.

#### **Tantangan? Pasti Ada!**

Meski menjanjikan, penerapan kedua sistem ini bukan tanpa hambatan. Salah

satu tantangannya adalah resistensi dari pihak-pihak yang selama ini terlanjur “nyaman” dengan sistem lama. Tak hanya itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah juga bisa menjadi kendala.

Namun, ini tidak menjadikan kita pesimistis. Pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan yang terbaik, di antaranya melalui peningkatan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia untuk memastikan kedua sistem ini berjalan dengan baik dan optimal. Selain itu, dukungan masyarakat umum juga penting. Masyarakat diminta untuk berani melaporkan jika masih menemukan oknum yang melakukan praktik curang meski sistem sudah diperbarui.

#### **Harapan untuk Masa Depan**

Dengan Neraca Komoditas dan SSs Perizinan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menekan korupsi secara sistematis. Tentu ini bukan solusi instan, diperlukan

waktu, konsistensi, dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan kedua sistem tersebut benar-benar menjadi senjata ampuh melawan korupsi.

Ke depan, Neraca Komoditas dan SSs Perizinan diharapkan tidak hanya menjadi alat untuk mendukung kebijakan saat ini, tetapi juga sebagai fondasi untuk kebijakan strategis yang lebih besar, salah satunya adalah pengembangan ekonomi hijau. Data dari kedua sistem ini dapat digunakan untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan kedua sistem ini, pemerintah memiliki peluang besar untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, kebijakan yang berbasis data, dan stabilitas yang lebih kuat dalam aspek ekonomi maupun politik. Di samping itu, keduanya juga menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi senjata ampuh untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan bebas korupsi. ■





## Makin Sat-Set dengan SSm QC Generasi 2

Oleh  
**Desty Arini**

**P**ENERAPAN Single Submission of Quarantine & Customs (SSm QC) dalam platform Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) terus berkembang seiring dengan teknologi yang kian memudahkan pertukaran informasi serta data, di samping meningkatkan akselerasi, akurasi, efisiensi waktu dan biaya.

SSm QC adalah sistem terintegrasi yang memfasilitasi proses perizinan karantina dan kepabean secara *online* melalui SINSW. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mengajukan dokumen Permohonan Tindakan Karantina (PTK) dan Pemberitahuan Pabeian Impor melalui satu *superset* data secara bersamaan.

### Fitur-Fitur Baru dalam SSm QC Generasi 2

- Penambahan *flag* kontainer dengan pilihan kontainer, kargo curah, dan kargo noncurah;
- Penambahan *flag* draft PC/HC dengan pilihan ya/ tidak;
- Penyesuaian penambahan kode modul;
- Penambahan elemen tingkat pengolahan dengan pilihan, yaitu sudah diolah atau belum diolah;
- Penambahan elemen daerah tujuan/ daerah asal;
- Penambahan elemen daerah tujuan/ daerah asal;
- Penambahan elemen pernyataan dan persetujuan pernyataan karantina;
- Penambahan jenis tempat instalasi karantina; dan
- Penggunaan NPWP 16 digit dan 6 digit NITKU Pengusaha /Importir, kolom NPWP Pemusatan, kolom Pemilik barang dan kolom PPJK.

Proses SSm QC meliputi proses pengajuan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara *single submission* hingga terbit Pelepasan Karantina dan Surat Persetujuan Pengeluaran

Barang. SSm QC terintegrasi dengan sistem-sistem *in-house* kementerian/lembaga lainnya, seperti CEISA milik DJBC, PPK Online (SisterKaroline milik BKIPM, IQFAST milik Barantan), ataupun Sistem Terminal Operator.

Kehadiran SSm QC bertujuan untuk membantu mempercepat waktu layanan dan memfasilitasi kemudahan bagi pengguna jasa. SSm QC menghilangkan repetisi dan duplikasi proses pengajuan impor dan ekspor serta meningkatkan transparansi layanan publik karena proses dan status dokumen dapat dipantau secara *real-time*. Izin yang diterbitkan pun dapat diakses oleh pelaku usaha secara *online*.

SSm QC pertama kali diimplementasikan secara penuh pada tahun 2020 di empat pelabuhan utama Tanah Air, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak. Pada 2021, implementasinya diperluas ke tiga pelabuhan (Merak, Makassar, serta Lampung) untuk proses bisnis pengajuan permohonan impor barang (BC 2.0) dan PPK.





## Pelabuhan dan Bandar Udara yang Telah Mengimplementasikan SSm QC Generasi 2



### Bandar Udara:

Soekarno-Hatta, Kualanamu,  
Balikpapan, Makassar,  
Ngurah Rai, Juanda.



### Pelabuhan:

Tanjung wangi, Gresik, Panjang, Merak, Kendari, Cilacap,  
Palembang, Batu Ampar, Pontianak, Bitung, Teluk bayur,  
Tenau, Dumai, Lembar, Lhokseumawe, Ambon, Balikpapan,  
Banjarmasin, Benoa, Tanjung Emas, Tanjung Balai Karimun,  
Tanjung Perak, Pantoloan, Belawan, Makassar, Tanjung  
Priok, Patimban, Nunukan, Kuala tungkal, Morowali,  
Samarinda, dan Pulau Baai.

Pada tahun 2022, SSm QC Generasi 1 dimutakhirkan menjadi Generasi 2. Pengembangan Generasi 2 merupakan *reengineering* SSm QC pada SINSW Generasi 1 yang dialihkan ke SINSW Generasi 2. Di dalam SSm QC Generasi 2, hadir sejumlah fitur baru yang membuat aplikasi tersebut makin optimal melayani pengguna.

Dalam perkembangannya, jumlah pelabuhan dan bandar udara

yang mengimplementasikan SSm QC Generasi 2 terus meningkat hingga mencakup 32 pelabuhan laut, 6 bandar udara, dan 3 lokasi kawasan berikat dengan mengakomodir dokumen BC 2.0, BC 2.3, PPFZT-01 sejak September 2023.

Dengan penyempurnaan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan, di tahun 2024, penggunaan NPWP 16 digit pada dokumen BC 2.0 mulai diim-

plementasikan sejak tanggal 1 Desember 2024. Kemudian, di bulan Januari 2025, penggunaan NPWP 16 digit juga diimplementasikan pada semua dokumen kepabeanan.

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi SSm QC tidak terlepas dari tantangan, seperti adaptasi teknologi oleh pelaku usaha dan kesiapan infrastruktur. Namun, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan semua pihak mema-

hami dan dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal. Ke depan, SSm QC akan terus dikembangkan dengan menghadirkan fitur-fitur baru yang canggih dan selaras kebutuhan publik.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, integrasi SSm QC dalam LNSW diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. ■





# Urus Fasilitas Fiskal Migas dan Panas Bumi Tanpa Pelik

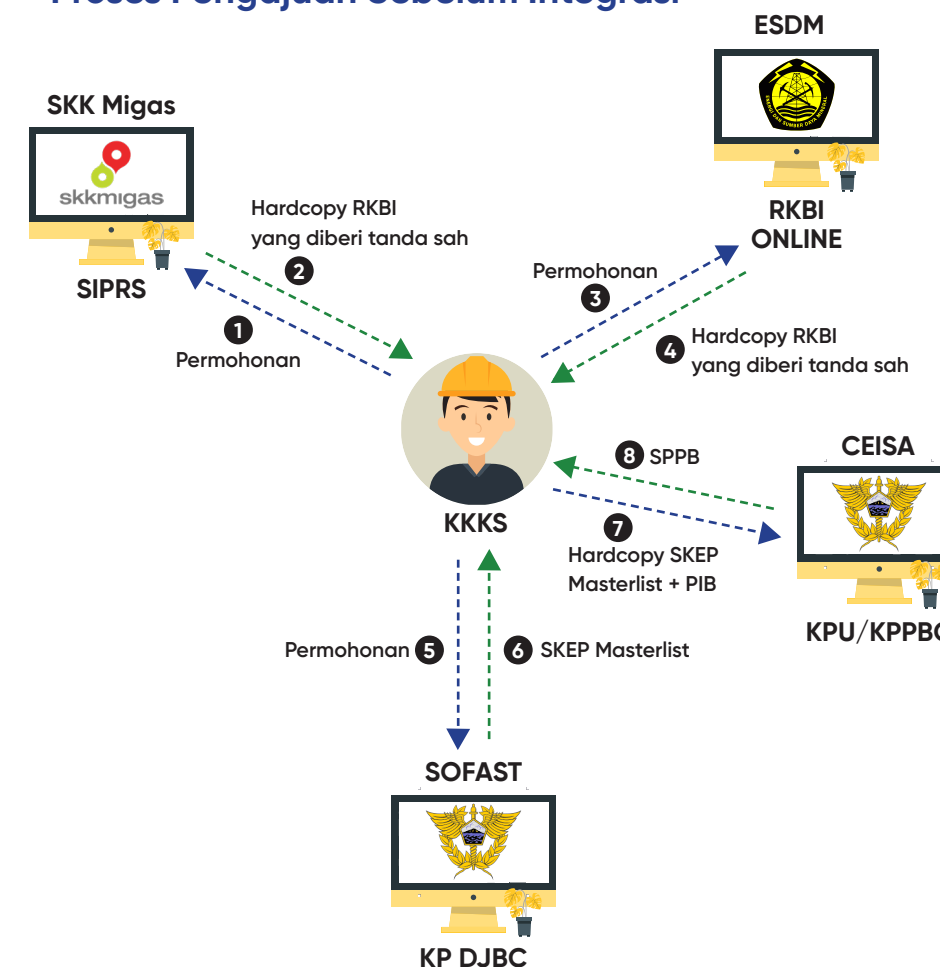
Oleh  
**Mochammad Rama  
Septianto Putro**

**T**IDAKLAH berlebihan jika dikatakan bahwa penerapan Single Submission Minyak dan Gas Bumi (SSm Migas) melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) merupakan langkah maju dalam modernisasi layanan publik di sektor energi. Dengan integrasi yang telah dilakukan, proses pengajuan fasilitas fiskal menjadi lebih sederhana, efisien, dan transparan.

SSm Migas, sesuai namanya, merupakan layanan elektronik yang dirancang untuk mempermudah pengajuan permohonan fasilitas fiskal di sektor bersangkutan. Fasilitas tersebut mencakup pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya pajak dalam rangka impor atas barang yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas. Pengajuan ini dilakukan melalui satu pintu menggunakan SINSW.

Eksistensi SSm Migas lantaran pemerintah bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengajuan permohonan fasilitas fiskal, prosedur yang kerap menjadi salah satu tantangan utama bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam mendukung operasional hulu migas. Layanan ini juga sejalan dengan upaya modernisasi birokrasi dan penguatan daya saing industri energi nasional.

## Proses Pengajuan Sebelum Integrasi



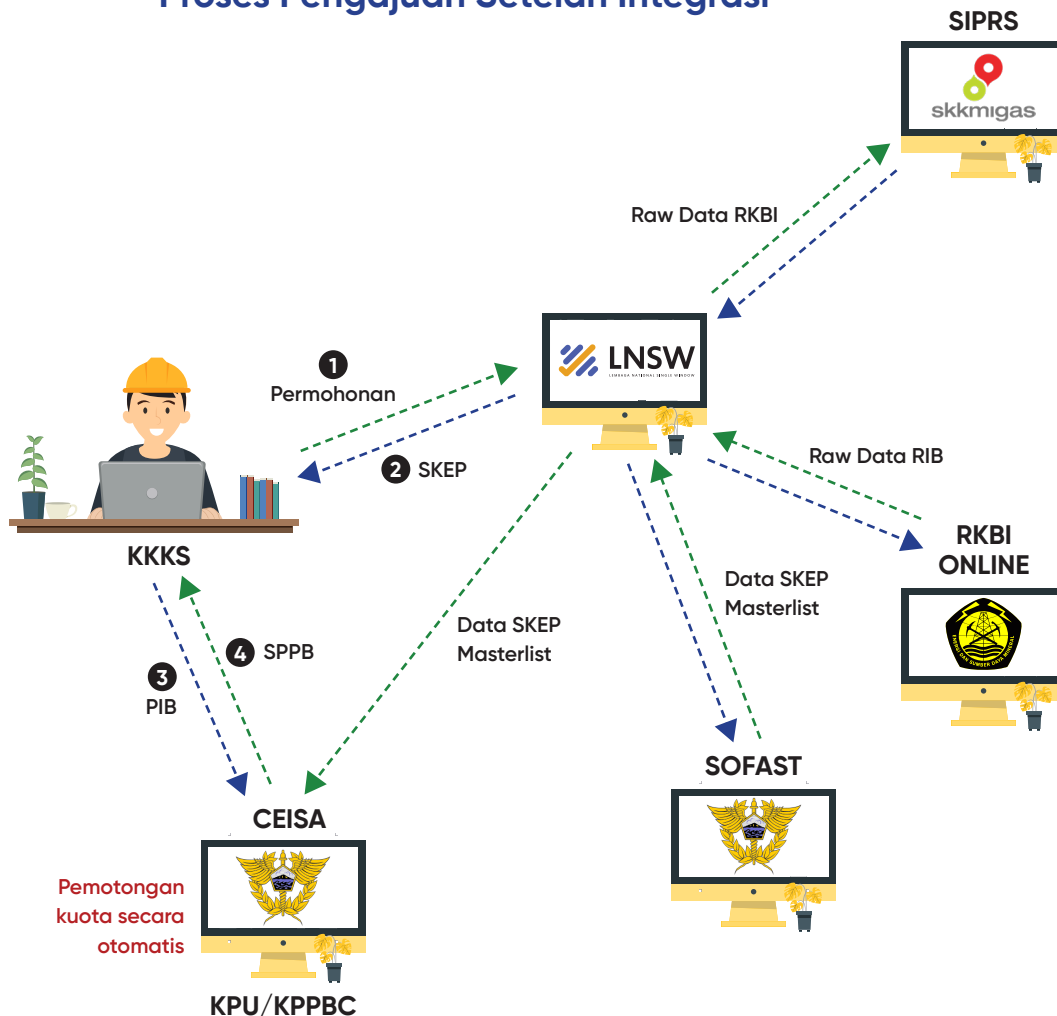
Sebelum SSm Migas terintegrasi, proses pengajuan fasilitas fiskal dilakukan melalui tiga sistem dan tahapan yang berbeda. Pertama, Sistem Informasi Pengelolaan Rantai Suplai (SIPRS) yang diampu oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sistem ini bertujuan untuk mendokumentasikan persetujuan rencana penggunaan barang impor.

Kemudian, Sistem Informasi Rencana Impor Barang (SIRIB) yang digunakan untuk memproses persetujuan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM). Selanjutnya, Sistem Online Fast Clearance (SOFAST) yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan persetujuan terkait pembebasan bea masuk.



Sebelum adanya layanan SSm Migas yang disediakan Lembaga National Single Window (LNSW), pengguna jasa harus menginput data yang sama di tiga sistem tersebut secara terpisah. Proses itu tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan data karena pengulangan penginputan informasi yang sama. Selain itu, koordinasi antarkementerian atau lembaga (K/L) sering kali memerlukan waktu lama sehingga turut memperpanjang waktu pemrosesan.

## Proses Pengajuan Setelah Integrasi



Dengan implementasi SSm Migas, proses pengajuan menjadi jauh lebih sederhana dan efisien. Semua permohonan kini cukup diajukan satu kali melalui platform SINSW. Sistem akan secara otomatis meneruskan permohonan tersebut ke K/L yang relevan, yaitu SKK Migas, Ditjen Migas, dan DJBC.

Hal tersebut menghilangkan pengulangan proses input data dan mempercepat waktu penyelesaian permohonan hingga terbitnya keputusan berupa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Pembebasan.

## SSm Migas Generasi II

SSm Migas Generasi II mulai diimplementasikan pada 16 Oktober 2023 dengan alamat situs <https://migas.insw.go.id>. Sistem ini membawa berbagai fitur baru yang semakin mempermudah proses pengajuan.

Penerapan SSm Migas memberikan dampak signifikan bagi industri hulu migas Indonesia. Dengan pengajuan satu kali dan proses yang terintegrasi, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas fiskal menjadi lebih singkat. Hal ini membantu KKKS untuk lebih fokus pada kegiatan operasional. Sistem yang terintegrasi juga memungkinkan semua pihak terkait untuk melacak status permohonan secara *real-time*. Hal ini meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dampak makronya, dengan sistem yang lebih mudah dan cepat, investor akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam industri hulu migas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggenjot produksi migas nasional.

Lebih lanjut, kehadiran SSm Migas Generasi II dengan fitur-fitur barunya semakin mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengelolaan industri hulu migas yang lebih baik. SSm Migas bukan hanya solusi teknis, melainkan juga refleksi dari visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan. Dengan sistem ini, Indonesia dapat terus meningkatkan daya saingnya di tingkat global, khususnya dalam sektor migas.

## Kemudahan Fitur Baru SSm Migas Generasi II

- **Edit Data Permohonan dan Tambah Dokumen Pendukung:** Pemohon kini dapat mengedit data permohonan dan menambahkan dokumen pendukung apabila terdapat pengembalian dari kementerian atau lembaga terkait. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan atau melengkapi dokumen tanpa harus memulai proses dari awal.
- **Penerimaan Sebagian dan Pengajuan Kembali:** Jika permohonan ditolak sebagian, pemohon dapat menerima bagian yang disetujui dan mengajukan kembali permohonan atas bagian yang ditolak. Fitur ini memastikan pemohon tidak kehilangan seluruh permohonan hanya karena ada kesalahan kecil di sebagian dokumen.
- **Dokumen Penandasahan RIB Tidak Perlu Input Ulang:** Sistem baru memungkinkan pemohon untuk tidak lagi menginput ulang dokumen penandasahan Rencana Impor Barang (RIB). Informasi tersebut otomatis terintegrasi di dalam sistem.
- **Perubahan Keputusan Menteri Keuangan (KMK):** Pemohon kini dapat mengajukan perubahan atas KMK yang sudah diterbitkan. Proses perubahan ini juga dilakukan secara elektronik melalui SINSW.
- **Penambahan Referensi Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat:** Sistem baru ini menambahkan referensi terkait lokasi pemasukan barang impor, termasuk kawasan berikat dan pusat logistik berikat. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemohon dalam menentukan tempat pemasukan barang yang sesuai dengan kebutuhan operasional.



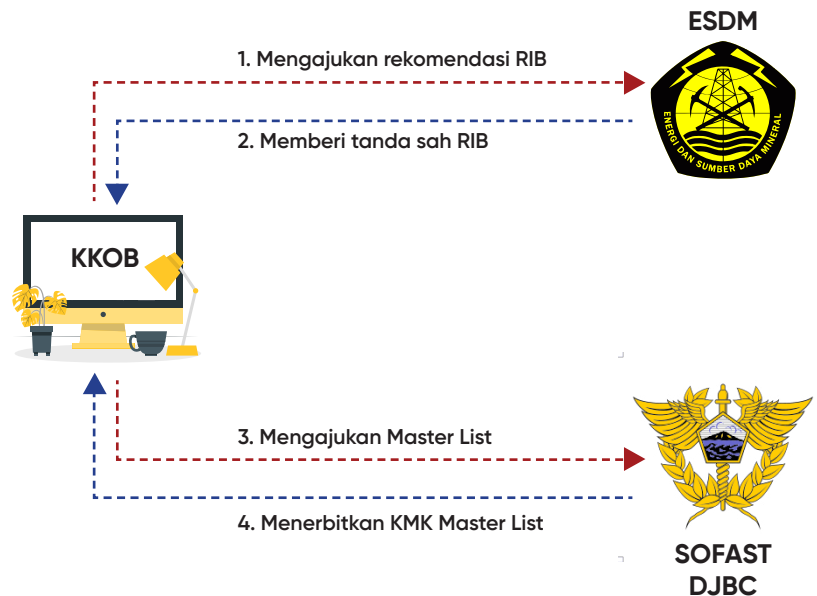


## Inovasi untuk Fasilitas Panas Bumi

Tidak hanya di sektor migas, pemerintah juga meningkatkan efisiensi di sektor panas bumi. Adalah SSm Panas Bumi, layanan elektronik yang dirancang untuk mempermudah pengajuan dokumen permohonan oleh pelaku usaha di bidang penyelenggaraan panas bumi. Layanan ini bertujuan mendukung persetujuan penggunaan fasilitas panas bumi yang diajukan secara terintegrasi melalui SINSW. Dengan adanya SSm Panas Bumi, proses yang sebelumnya kompleks menjadi lebih efisien, transparan, dan terstruktur.

Penerapan SSm Panas Bumi sejalan dengan upaya pemerintah dalam memodernisasi pelayanan publik di sektor energi, khususnya dalam mendukung pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari transisi energi bersih di Indonesia.

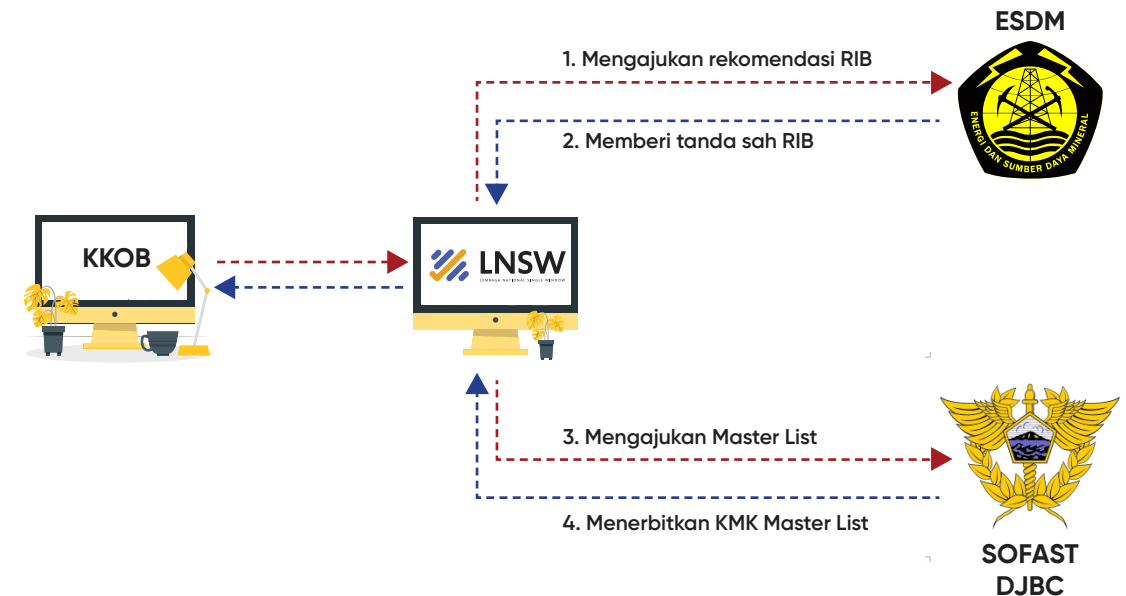
## Proses Pengajuan Sebelum Integrasi



Sebelum adanya integrasi melalui SSm Panas Bumi, proses pengajuan untuk mendapatkan fasilitas fiskal di sektor panas bumi melibatkan beberapa langkah. Pelaku usaha di bidang penyelenggaraan panas bumi harus melakukan sejumlah pengajuan kepada K/L terkait yang masing-masing memiliki sistemnya sendiri. Setiap pengajuan harus dilakukan secara terpisah ke berbagai K/L yang bertanggung jawab atas bagian tertentu dalam proses persetujuan fasilitas fiskal. Selain itu, proses ini bisa juga menyebabkan pengulangan input data. Pelaku usaha harus mengisi data yang sama berulang kali pada setiap sistem K/L sehingga meningkatkan risiko kesalahan input dan memakan waktu lebih lama.

Proses yang terpisah-pisah dan berulang ini sering kali menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha karena mereka harus memahami dan mematuhi prosedur yang berbeda-beda di setiap K/L. Hal ini menghambat kelancaran operasional dan mengurangi efisiensi secara keseluruhan.

## Proses Pengajuan Setelah Integrasi



Integrasi sistem melalui SSm Panas Bumi mensimplifikasi proses pengajuan. Pelaku usaha hanya perlu melakukan pengisian elemen data serta dokumen pendukung melalui SINSW. Data yang diinput akan dialirkan ke K/L terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk diproses lebih lanjut. Sistem terintegrasi ini juga menghilangkan kebutuhan untuk menginput data secara berulang di berbagai sistem K/L. Hal ini mempercepat proses pengajuan dan mengurangi risiko kesalahan data.

Setelah pelaku usaha mengajukan permohonan melalui SINSW, data akan secara otomatis diteruskan ke K/L terkait. Pelaku usaha tidak perlu lagi menyampaikan permohonan secara manual ke setiap K/L karena seluruh koordinasi dilakukan melalui sistem. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses, tetapi juga memberikan kejelasan kepada pelaku usaha mengenai status pengajuan mereka melalui sistem yang terstandarisasi.



Sistem terintegrasi ini juga menghilangkan kebutuhan untuk menginput data secara berulang di berbagai sistem K/L. Hal ini mempercepat proses pengajuan dan mengurangi risiko kesalahan data."



## SSm Panas Bumi Gen II

SSm Panas Bumi Generasi II mulai beroperasi pada 31 Juli 2024. Berbagai fitur baru disediakan untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi tambahan bagi pelaku usaha.

Selain fitur pengajuan, SSm Panas Bumi Generasi II juga dilengkapi dengan fitur pelaporan yang dirancang untuk mendukung pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka, di antaranya fitur pelaporan yang memungkinkan Kkob untuk menyusun laporan dari semua elemen data yang sudah tersedia. Laporan ini dapat disubmit melalui SINSW, sehingga mempermudah proses administrasi.

Selain itu, juga terdapat fitur Notifikasi Reminder Pelaporan yang memungkinkan SINSW untuk mengirimkan notifikasi pengingat secara otomatis kepada Kkob mengenai kewajiban pelaporan yang harus diselesaikan. *Trigger* notifikasi ini dilakukan oleh Kkob untuk memastikan pelaku usaha tidak melewati tenggat waktu pelaporan.

Sebagaimana SSm Migas Generasi II, kehadiran SSm Panas Bumi Generasi II juga merupakan langkah maju dalam modernisasi pelayanan publik di sektor energi. Dengan berbagai fitur baru yang dihadirkan, sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses pengajuan dan pelaporan, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui SSm Panas Bumi, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. Dengan sistem yang lebih canggih dan terintegrasi, diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan daya saingnya di sektor energi, sekaligus mencapai target pengurangan emisi karbon secara berkelanjutan. ■

## Fitur-Fitur Utama SSm Panas Bumi Generasi II

- **Notifikasi Status Pengajuan:** Sistem ini menyediakan notifikasi status pengajuan kepada pengguna, baik kepada badan usaha panas bumi (Kkob) maupun petugas pendukung K/L terkait, melalui WhatsApp (WA) dan email. Fitur ini memastikan semua pihak mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan pengajuan.
- **Penggunaan Kontrak Kerja Sama Sebelumnya:** Pelaku usaha tidak perlu lagi mengunggah ulang dokumen kontrak kerja sama setiap kali mengajukan permohonan baru. Dokumen kontrak yang telah terunggah sebelumnya dapat digunakan kembali, sehingga menghemat waktu dan usaha.
- **Input Kolom Keterangan Barang hingga 8.000 Karakter:** Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk memberikan keterangan barang yang lebih rinci dengan kapasitas hingga 8.000 karakter. Fitur ini membantu memastikan data barang yang diajukan lebih akurat dan terperinci.
- **Validasi Satuan Barang:** Sistem melakukan validasi otomatis atas satuan barang yang sesuai dengan satuan wajib untuk kode HS (Harmonized System) yang telah ditetapkan. Hal ini membantu memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan. **Fitur Duplikasi Data Aju:** Jika permohonan ditolak oleh sistem perizinan EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi), pelaku usaha tidak perlu menginput ulang data dari awal. Mereka cukup melakukan perbaikan pada data yang diperlukan, sehingga proses pengajuan ulang menjadi lebih cepat dan efisien.
- **Fitur Perubahan KMK Pembebasan:** Sistem memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang telah diterbitkan. Proses ini dilakukan secara elektronik, sehingga lebih mudah dan transparan.







# Dwelling Time Apik Daya Saing Ciamik

Oleh  
**Syahrul Ramadhan**

**D**I tengah deru ekonomi global yang semakin kompetitif, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia menjadi simpul strategis yang menghubungkan negara ini dengan dunia. Pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak hanya berperan sebagai gerbang perdagangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam mengoptimalkan kinerja pelabuhan adalah *dwelling time*, faktor yang memengaruhi efisiensi dan kualitas pelayanan.

*Dwelling time*, yang biasa disingkat dengan DT, adalah waktu yang dibutuhkan sejak barang turun dari kapal atau barang ditimbun sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Data DT diperoleh dari 10 terminal operator di lima pelabuhan utama di Indonesia, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar,

Pelabuhan Tanjung Emas, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Mempersingkat DT terbilang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya logistik serta daya saing ekonomi.

Saat ini, pemerintah telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi DT. Berdasarkan data yang dihimpun Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan, capaian rata-rata DT nasional sepanjang tahun 2024 dari 10 terminal operator di lima pelabuhan utama di Indonesia tersebut terbilang bagus. Angka rata-rata DT tersebut ialah 2,88 hari. Adapun target DT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah 2,9–3,2 hari pada tahun 2024.

Pencapaian target DT menjadi mandat bagi LNSW yang berada di bawah Kementerian Keuangan dengan ditetapkannya di dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020–2024 dan Renstra LNSW Tahun 2020–2024. Target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah melalui LNSW Kemenkeu untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Kepala LNSW Oza Olavia menyatakan, capaian *dwelling time* yang sudah berada di bawah target 2,9 hari tergolong bagus untuk negara kepulauan seperti Indonesia. “Secara internasional, untuk negara kepulauan seperti kita, 2,9 hari termasuk cukup bagus. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara yang hanya barangnya transit seperti Singapura,” katanya pada *talkshow* bertajuk “APBN Dorong Penguatan Logistik Guna Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi”, Jumat (6/12/24).

Setiap tahunnya, LNSW rutin memantau dan menganalisis angka rata-rata DT nasional dengan berbasis data yang dapat dipantau secara *real-time*. LNSW menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada capaian DT nasional sehingga dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perbaikan indeks efisiensi ekspor, impor, dan logis-

tik secara berkelanjutan.

Secara agregat (DT nasional), capaian kinerja DT periode Desember 2024 sebesar 3,04 hari, atau menurun 19,69% daripada Desember 2023 sebesar 2,54 hari (yoy). Capaian kinerja DT periode Desember 2024 sebesar 95,39% di bawah target 2,90 hari. Adapun DT terbesar terjadi di bulan April 2024, yaitu sebesar 3,45 hari.

Hal tersebut dipengaruhi oleh pembatasan lalu lintas barang selama libur Lebaran, dan pengetatan impor serta penambahan persyaratan perizinan impor berupa peraturan teknis (pertek) pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

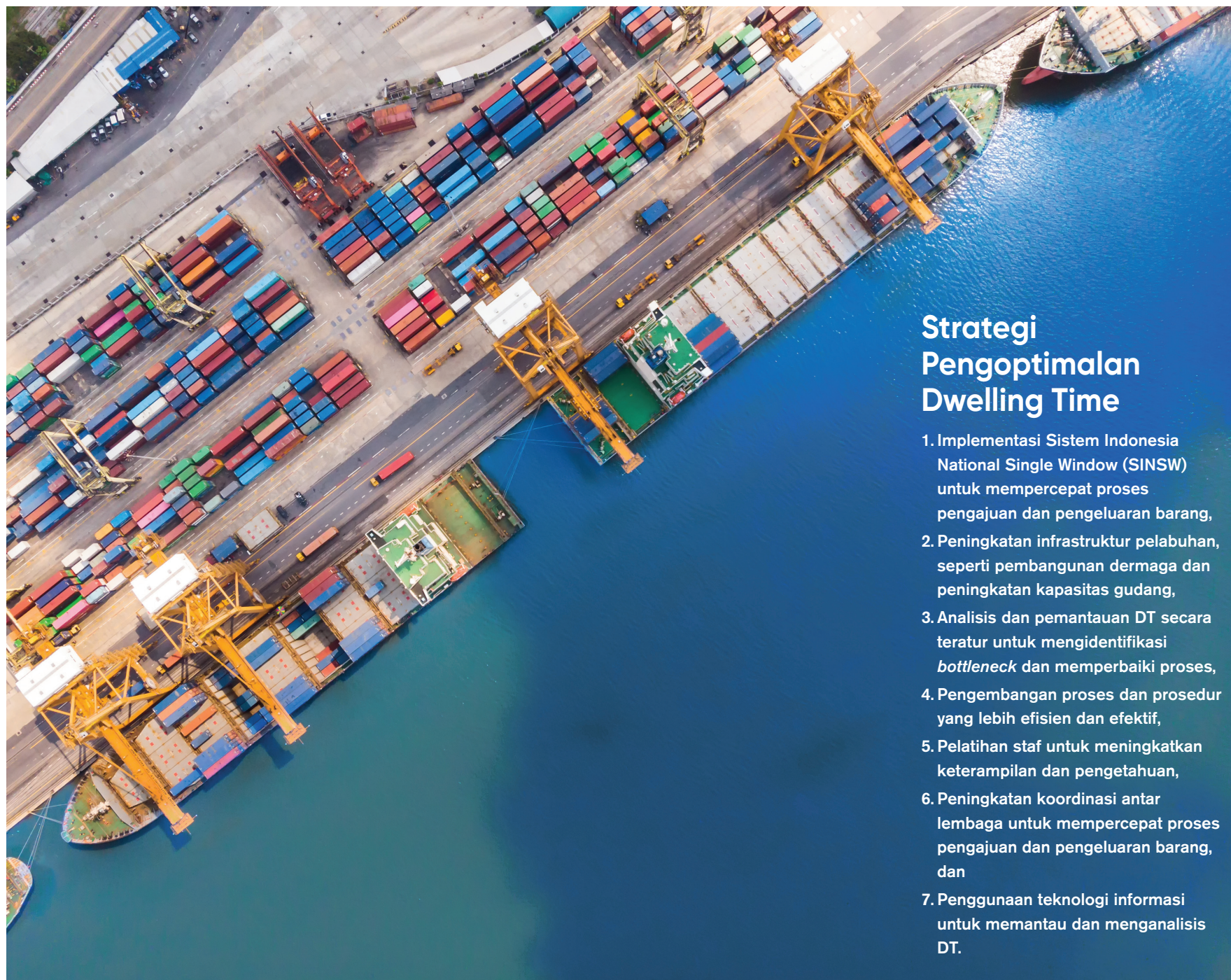


Secara internasional, untuk negara kepulauan seperti kita, 2,9 hari termasuk cukup bagus. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara yang hanya barangnya transit seperti Singapura.”

**Oza Olavia**  
Kepala LNSW

Dalam rangkaian prosesnya, DT mencakup tiga tahapan utama. Pertama, *pre-customs clearance* atau waktu yang diperlukan sejak peti kemas dibongkar dari kapal sampai dengan pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran. Berikutnya ialah *customs clearance* atau waktu yang dibutuhkan sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang oleh bea cukai. Terakhir, *post-customs clearance* atau waktu yang dibutuhkan sejak persetu-





## Strategi Pengoptimalan Dwelling Time

1. Implementasi Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mempercepat proses pengajuan dan pengeluaran barang,
2. Peningkatan infrastruktur pelabuhan, seperti pembangunan dermaga dan peningkatan kapasitas gudang,
3. Analisis dan pemantauan DT secara teratur untuk mengidentifikasi *bottleneck* dan memperbaiki proses,
4. Pengembangan proses dan prosedur yang lebih efisien dan efektif,
5. Pelatihan staf untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan,
6. Peningkatan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat proses pengajuan dan pengeluaran barang, dan
7. Penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan menganalisis DT.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan DT. Optimalisasi tersebut membawa berbagai manfaat, seperti efisiensi operasional yang meningkat, biaya logistik berkurang, dan kualitas pelayanan membaik. Selain itu, dampak terhadap lingkungan berkurang karena penyingkatan waktu tunggu kapal. Daya saing pelabuhan Indonesia juga menguat sehingga meningkatkan perekonomian nasional.

Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan mampu bergerak semakin cepat di tahun ini, sebagaimana mampu menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2024. Kinerja APBN 2024 menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan APBN 2025. Peran APBN terus dioptimalkan untuk menjaga perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program-program prioritas pemerintahan baru.

Kepala LNSW Oza Olavia juga menyampaikan bahwa APBN telah dan akan terus menjaga dan mendukung transformasi digital. Sejalan dengan itu, LNSW berkomitmen turut mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital layanan ekspor, impor, dan logistik.

Keterlibatan semua pihak sangat penting untuk mengoptimalkan *dwelling time* dan meningkatkan efisiensi pelabuhan Indonesia. Namun demikian, patut dipahami bahwa dalam konteks peningkatan produktivitas dan menurunkan biaya logistik, *dwelling time* hanya salah satu dari banyak faktor, seperti kapasitas pelabuhan, tata kelola (*governance*), kapasitas pengangkut, hingga sistem pelayanan, yang peningkatan kinerjanya perlu terus diupayakan bersama-sama. Dengan kolaborasi dan komitmen, pelabuhan Indonesia akan menjadi lebih efisien dan kompetitif di kancah global sehingga dapat ikut mendorong penguatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. ■

juan pengeluaran barang sampai dengan pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan sementara.

Berdasarkan tahapan pengajuan kon-

tainer PIB pada Desember 2024, waktu rata-rata yang diperlukan pada tahapan *pre-customs clearance* adalah 1,49 hari. Sementara itu, pada tahapan *customs*

*clearance*, waktu rata-rata yang diperlukan adalah 0,19 hari. Pada tahapan *post-customs clearance*, waktu rata-rata adalah 1,34 hari.





# Sang Konduktor Orkestra

Oleh  
Elok Bakti Pratiwi

**B**AYANGKAN negara Indonesia ini seperti sebuah keluarga besar. Layaknya sebuah keluarga yang mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan, negara juga perlu mengatur keuangannya, mengelola pendapatannya untuk membiayai pembangunan, membayar utang, dan memberikan layanan publik yang baik. Di Indonesia sendiri, pendapatan domestiknya antara lain bergantung pada bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada, termasuk mengelola berbagai komoditas unggulan.

Namun, muncul sebuah tantangan di dalamnya: bagaimana memastikan semua potensi pendapatan ini benar-benar dikelola dengan baik? Di sinilah peran Neraca Komoditas sebagai peta pasokan yang sangat penting. Lebih dari sekadar data, Neraca Komoditas adalah instrumen yang memastikan pasokan komoditas strategis kita tetap stabil dan ekonominya terus melaju.

## Bye-Bye Lonjakan Harga!

Bukan rahasia lagi, harga bahan pokok seperti beras, gula, atau minyak goreng di Tanah Air bisa naik-turun bak *roller coaster*, terlebih ketika mendekati hari raya. Namun, dengan hadirnya Neraca Komoditas, pasokan aktual setiap komoditas dicatat secara rinci. Artinya, ketika permintaan melonjak, pemerintah telah memiliki data akurat untuk mencegah kelangkaan yang berpotensi membuat harga naik, misalnya dengan strategi operasi pasar atau impor terencana. Hasilnya, harga menjadi lebih stabil, dan masyarakat dapat berbelanja tanpa panik.

## UMKM Jalan Terus

Suplai bahan baku yang stabil adalah nyawa bagi UMKM. Bayangkan jika pengusaha bakso kehabisan daging untuk memproduksi baksonya atau pembuat kue kesulitan mendapat gula, tentu hal itu akan menghambat produksinya.

Dengan data pasokan aktual dari Neraca Komoditas, ketersediaan bahan baku bisa dijaga. UMKM pun tetap bisa memproduksi dengan lancar, lapangan kerja tetap tersedia, dan ekonomi makin menggeliat.

Serunya, dengan pasokan yang terjaga, UMKM tidak hanya akan bisa bertahan, tapi juga bisa berkembang, bahkan bisa berekspansi ke pasar internasional.

## Investasi dan Transparansi

Investor itu layaknya kita saat berbelanja *online*, suka jika ada transparansi. Dengan Neraca Komoditas, data tentang ketersediaan dan kebutuhan komoditas jadi lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu membuat investor percaya untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis seperti misalnya tambang ataupun pertanian. Masuknya investasi baru tidak hanya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi.

Di sisi lain, transparansi pun akan me-

nutup celah untuk praktik penimbunan barang yang membuat harga-harga melonjak. Ini seperti memiliki sebuah cermin besar yang membuat semua proses distribusi jadi lebih jelas dan adil. Data aktual Neraca Komoditas membuat distribusi lebih transparan sehingga ekonomi menjadi lebih sehat.

## Ekspor Jadi Andalan

Indonesia adalah pemain besar di pasar komoditas dunia. Minyak sawit, batu bara, hingga nikel adalah beberapa contoh primadona ekspor kita. Dengan Neraca Komoditas, pasokan untuk ekspor dapat diatur tanpa harus mengorbankan kebutuhan domestik. Dengan begitu, kepercayaan mitra dagang internasional pun kian meningkat. Mereka tahu, Indonesia dapat diandalkan untuk memenuhi kontrak ekspor tanpa drama kekurangan pasokan.

## Sang Maestro Ekonomi Indonesia

Seperti sebuah orkestra megah, setiap alat musik harus memainkan nada yang tepat agar melahirkan harmoni sempurna. Begitu pula ekonomi Indonesia, yang mengandalkan Neraca Komoditas sebagai sang konduktor. Dengan pasokan aktual yang tertata, semua sektor—dari UMKM hingga ekspor—bekerja seperti simfoni yang apik.

Neraca Komoditas bukan hanya soal angka atau laporan semata. Ia adalah penyeimbang, penjaga stabilitas, dan pendorong pertumbuhan. Ia memastikan tidak ada nada sumbang dalam perputaran ekonomi, dari harga yang stabil di pasar hingga kepercayaan global pada ekspor kita. Bahkan, ia mampu menutup celah bagi spekulasi dan permainan nakal di pasar.

Jadi, masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan kompetitif dimulai dari sini. Dengan Neraca Komoditas sebagai amunisi, Indonesia tak hanya siap menghadapi tantangan, tapi juga melangkah penuh percaya diri menuju panggung global. ■





# Single Submission Pengangkut: Era Baru Layanan Kepelabuhanan

Oleh  
**Muh. Fadli Budiman**

**P**ELABUHAN memegang peran krusial sebagai simpul logistik jaringan transportasi global. Indonesia, layaknya negara maritim, memiliki lebih dari seribu pelabuhan tersebar di sepanjang garis pantainya. Di sisi lain, sistem logistik Indonesia mempunyai kompleksitas cukup tinggi yang disebabkan kerumitan birokrasi dan rendahnya tingkat adaptasi digital, terutama pada aspek sistem pelayanan kapal. Kondisi tersebut tentu berimplikasi pada inefisiensi biaya dan waktu logistik.

Sengkarut tata kelola logistik Indonesia turut tecermin

pada Indeks Kinerja Logistik atau *Logistic Performance Index* (LPI) yang dirilis Bank Dunia, 2023. Indonesia menelan pil pahit dengan turun 17 peringkat dan menempati urutan ke-63. Padahal, pada 2018, Indonesia berada pada urutan ke-46. Perlu langkah konkret para pemangku kepentingan untuk membenahi ekosistem logistik nasional secara terpadu.

Sejatinya, pemerintah telah menginisiasi Single Submission (SSm) Pengangkut sebagai integrator layanan kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan. Sistem ini merupakan wujud simplifikasi proses bisnis pemerintah yang bertujuan mereduksi repetisi dan duplikasi data maupun dokumen.

SSm Pengangkut melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Lembaga National Single Window (LNSW) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras).

SSm Pengangkut pertama kali diujicobakan di Pelabuhan Tanjung Priok pada pertengahan 2021. Sebagai salah satu program National Logistic Ecosystem (NLE) sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, implementasi SSm Pengangkut terus diperluas dengan target 14 pelabuhan pada 2022, kemudian ditambah 32 pelabuhan pada 2023. Di pengujung 2024, K/L vertikal di sebanyak 57 pelabuhan sudah mengimplementasikan SSm Pengangkut

Perluasan utilisasi SSm Pengangkut cukup masif karena program ini juga didorong oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Perbaikan ekosistem logistik melalui penyederhanaan layanan satu pintu yang terintegrasi secara elektronik merupakan solusi yang pas dalam pemberantasan korupsi serta pungutan liar (pungli).

Jauh ke depan, SSm Pengangkut merupakan manifestasi untuk meningkatkan transparansi serta *check and balance* di antara K/L terkait.



Perbaikan ekosistem logistik melalui penyederhanaan layanan satu pintu yang terintegrasi secara elektronik merupakan solusi yang pas dalam pemberantasan korupsi serta pungutan liar (pungli). Jauh ke depan, SSm Pengangkut merupakan manifestasi untuk meningkatkan transparansi serta *check and balance* di antara K/L terkait.

## Pemanfaatan dan Reengineering SSm Pengangkut Sepanjang 2024

Perluasan SSm Pengangkut terus ditingkatkan sepanjang 2024 dengan menargetkan tambahan enam pelabuhan, yakni Patimban, Meulaboh, Pekanbaru, Talangduku, Bontang, dan Sangatta. Bak gayung bersambut, di pertengahan Januari tahun lalu, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub pun menerbitkan Surat Edaran No. 2 tahun 2024 sebagai legitimasi yang mewajibkan penggunaan SSm Pengangkut pada 46 pelabuhan yang telah *piloting* dua tahun sebelumnya.

Alhasil, secara keseluruhan, selama masa uji coba tiga tahun terakhir, pemanfaatan SSm Pengangkut mencapai 141.596 aju kedatangan dan 96.996 aju keberangkatan kapal.





Sepanjang Januari—November 2024, jumlah pengajuan layanan kedatangan kapal melalui SS<sub>m</sub> Pengangkut mencapai 117.376 dan 86.303 untuk keberangkatan. Jumlah ini melonjak masing-masing sebesar tujuh kali lipat atau 16.733 aju untuk kedatangan dan sepuluh kali lipat atau 7.987 aju untuk keberangkatan kapal pada periode yang sama di tahun 2023.

Sistem ini menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen dengan berorientasi pada kerja sama antarinstansi pemerintah melalui simplifikasi proses guna penghapusan repetisi dan duplikasi. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor KSOP kelas II Patimban Capt. Dian Wahdiana dalam “Deklarasikan penerapan NLE di Pelabuhan Patimban”, Rabu (08/05/2024).

Tidak hanya fokus mendorong pemanfaatan di berbagai pelabuhan, perluasan

SS<sub>m</sub> Pengangkut juga merambah segi fitur integrasi layanannya. Sebagai upaya standarisasi layanan kapal oleh badan usaha pelabuhan (BUP), dilakukan pengembangan sistem guna mengakomodasi Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) melalui SS<sub>m</sub> Pengangkut. Standardisasi ini dilakukan dengan mengadopsi fitur PPKB pada aplikasi Phinisi milik PT Pelindo yang sudah berjalan di sebagian besar pelabuhan komersil.

Selain transformasi digital layanan kapal secara terpadu, langkah ini diambil utamanya guna menertibkan operasional BUP yang kerap dinilai belum memenuhi syarat, baik dari segi administrasi maupun kelaiklautan. Kolaborasi ini juga didesain untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi pada layanan BUP. Oleh sebab itu, ke depannya, BUP non-Pelindo dapat menggunakan sistem

Inaportnet As Operator (INAOps) milik Kemenhub yang terintegrasi dengan SS<sub>m</sub> Pengangkut untuk *approval* layanan Pandu, Tunda, Tambat, serta Rencana Kerja Bongkar Muat.

Tidak hanya fokus pada percepatan layanan kapal, pemerintah juga menjadikan SS<sub>m</sub> Pengangkut sebagai instrumen pengawasan distribusi barang tertentu. Hal ini dilandasi dengan rilisnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean. Kriteria barang tertentu di sini terbatas pada komoditas yang dikenakan bea keluar, subsidi, dan/atau masuk kategori larangan atau pembatasan sesuai perundangan-undangan di bidang kepabeanan.

Tujuan pengawasan ini sejatinya mengantisipasi penyelundupan ekspor melalui

modus pengangkutan dalam negeri. Sebelumnya, produk bernilai tinggi seperti mineral dan barang tambang maupun hasil hutan kerap menjadi komoditas sasaran sehingga menimbulkan kerugian negara dari potensi pajak dan bea ekspor yang tidak terealisasi. Oleh karenanya, digitalisasi dan integrasi data memegang peran krusial dalam memantau pengangkutan barang. Seiring berlakunya PMK tersebut, para agen pelayaran diwajibkan menyampaikan Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu (PPBT) melalui SS<sub>m</sub> Pengangkut.

### **Single Billing PNPB Jasa Kepelabuhanan**

Kemudahan dan fasilitasi pembayaran tentu mendorong performa logistik di pelabuhan. Upaya pemangkasan birokrasi tidak hanya pada layanan kapal oleh



K/L maupun BUP, tetapi juga pada aspek pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-nya. Sebagai perwujudan pilar ketiga NLE guna mempercepat proses logistik, fitur *single billing* pada SSm Pengangkut mengakumulasi tagihan PNBP dalam satu siklus kegiatan kapal, mulai dari kedatangan sampai keberangkatannya di pelabuhan.

Jenis PNBP yang ditagihkan terbatas pada layanan Labuh, Rambu, dan *Vessel Traffic Service* (VTS) yang diberikan Kemenhub. Sementara itu, pada sisi Kemenkes, terdapat layanan utama yakni *Certificate of Pratique* (COP) dan *Port Health Quarantine Certificate* (PHQC). Kemudian pengajuan Buku Kesehatan Kapal, P3K Kapal, dan Sertifikat Sanitasi Kapal sebagai layanan tambahan oleh Kemenkes.

Dari uraian di atas, secara umum terdapat minimal lima layanan PNBP yang ditagihkan oleh Kemenhub maupun Kemenkes dalam satu siklus kedatangan dan keberangkatan kapal. Dengan menggunakan fitur *single billing*, agen pelayaran tidak perlu lima kali bolak-balik melakukan pembayaran yang mana tidak efisien secara waktu. Mereka cukup melakukan sekali pembayaran PNBP, yakni sesaat sebelum keberangkatan kapal.

Pertama kali diujicobakan pada Oktober 2022 di Pelabuhan Tanjung Perak, jumlah *piloting single billing* mencapai 1.194 pengajuan dengan nilai transaksi PNBP senilai Rp6,3 miliar per November 2024. Angka tersebut berasal dari implementasi 24 pelabuhan. Agen pelayaran di Pelabuhan Kendari menjadi yang paling masif mendeklarasikan penggunaan *single billing* dengan 274 transaksi dalam lima bulan terakhir yang dimulai pada 27 Juni 2024.

“*Single billing* mempermudah para pengguna jasa melakukan satu pembayaran untuk dua instansi, yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini KSOP dan Balai Karantina Kesehatan,” pungkash Capt.



Rahman selaku Kepala KSOP Kendari saat “Ujicoba Penerapan *Single Billing*”, pada Kamis (25/07/2024).

*Single billing* PNBP juga turut mendorong efisiensi anggaran yang dibayarkan pemerintah ke bank persepsi. Dalam setiap transaksi penerimaan negara, bank persepsi mendapatkan imbalan jasa pelayanan yang jumlahnya berkisar Rp2.000,00—6.000,00 sesuai nilai PNBP-nya. Klausul ini termaktub dalam Pasal 60 PMK No. 225 Tahun 2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Sebagai ilustrasi, umumnya terdapat lima tagihan PNBP pada satu siklus kegiatan kapal. Atas lima kali transaksi tersebut, pemerintah harus membayarkan total Rp20.000 kepada bank persepsi, dengan asumsi Rp4.000 atas setiap

*billing*. Di sisi lain, dengan mekanisme *single billing*, hanya akan tercipta satu tagihan yang mewajibkan pemerintah membayar maksimal sebesar Rp6.000 ke bank persepsi. Maka, apabila penggunaan *single billing* SSm Pengangkut diwajibkan di setiap pelabuhan, bisa dibayangkan besarnya potensi penghematan anggaran oleh pemerintah.

Dewasa ini, proses bisnis *single billing* tidak terbatas pada layanan satuan kerja kementerian, melainkan turut mengakomodasi tagihan PNBP pada unit badan layanan umum (BLU) seperti Distrik Navigasi Tanjung Priok sejak 26 Maret 2024. Kolaborasi sistem ini melibatkan Bank Mandiri sebagai bank persepsi. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas dan proses penyempurnaan tidak henti-hentinya dilakukan pada setiap sendi logistik.

Layanan SSm Pengangkut terkonfirmasi

memberikan efisiensi waktu dan biaya sebagaimana survei independen Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) di tahun 2024.

Hasil survei memperlihatkan adanya efisiensi waktu sebesar 71,4%. Sebelumnya, tercipta 15,8% efisiensi biaya pada layanan SSm Pengangkut sepanjang 2023. Angka ini memberikan optimisme bahwa program perbaikan logistik di area pelabuhan saat ini sudah berjalan pada arah tepat. Lebih jauh, semoga kehadiran layanan SSm Pengangkut mampu mendorong peningkatan efisiensi ekosistem logistik nasional untuk mewujudkan daya saing perekonomian tingkat global. Mari lebih rapatkan barisan, lanjutkan sinergi dan komitmen lintas K/L yang telah terjalin guna menyongsong era baru layanan kepelabuhanan melalui pemanfaatan SSm Pengangkut. ■





# Pikat Investor dengan Sistem Aplikasi KEK

Oleh  
Arkan Fanega

**K**EHADIRAN investor bagi suatu negara yang ingin memajukan perekonomiannya telah menjadi suatu keniscayaan. Modal atau investasi yang mereka tanamkan dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*), mulai dari membantu menambah lapangan kerja hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, giat melakukan berbagai upaya untuk memikat para penanam modal.

Nah, bicara soal menggaet investor, barangkali yang tebersit di benak kita ialah sebatas kepada investor-investor asing. Namun, sesungguhnya di dalam negeri sendiri, banyak sekali pelaku usaha yang berpotensi untuk berkembang dan berkontribusi signifikan pada penguatan perekonomian daerah. Hal tersebut tidak luput dari perhatian pemerintah Indonesia.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia dengan kondisi wilayah yang beragam mempunyai potensi sumber daya teramat besar. Apabila potensi tersebut tidak dikelola apik, atau malah dibiarkan saja, tentu bisa menimbulkan kerugian. Sebaliknya, jika potensi tersebut diatur dengan tata kelola yang baik, dapat menumbuhkan perekonomian daerah atau kawasan bersangkutan sekaligus memperkuat daya saingnya. Di sinilah kita mengenal akan adanya geoekonomi.

Apabila kawasan tersebut memiliki potensi luar biasa dengan pengelolaan mumpuni, akan tercipta hasil yang berdaya guna bagi seluruh sumber daya di sekitarnya. Perlu dipahami bahwa kawasan tersebut perlu berada di bawah pengawasan oleh pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan berlaku agar dapat dikelola lebih baik. Hal tersebut didasari atas pertimbangan bahwa dampak faktor yang ditimbulkan tidak hanya dari sektor ekonomi, demografi dan geografi saja, tapi juga bisa memengaruhi sektor politik luar negeri suatu negara, dan harus memiliki strategi yang memberikan peran tertentu pada kawasan tersebut. Hal tersebut kita bisa sampaikan sebagai geostrategi.

Suatu kawasan dengan faktor geoekonomi dan geostrategi akan memiliki keunggulan dalam memajukan sumber daya alam maupun manusia untuk mengangkat daya saing ekonominya. Umpama, lewat pengadaan beraneka fasilitas, seperti keringanan fiskal maupun nonfiskal, yang bisa menarik para investor, khususnya dari dalam negeri, untuk menanamkan modal mereka di kawasan bersangkutan. Dengan demikian, kawasan tersebut bisa berdaya guna tinggi hingga menjadi pendorong ekonomi dan mendatangkan pemasukan untuk daerah tersebut.

Tidak hanya faktor ekonomi saja, ada pula keuntungan nonfiskal dari sisi ketenagakerjaan. Para pelaku atau badan usaha dapat dengan mudah merekrut

tenaga kerja, dengan dukungan regulator dan efisiensi birokrasi, sehingga bisa menjadi peluang terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

## Kehadiran KEK

Pengadaan dan pengaturan kawasan sedemikian rupa telah dicetuskan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Secara ringkasnya, pasal 1 pada peraturan tersebut menjelaskan pengertian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Tentu hal ini disambut hangat oleh para pelaku maupun badan usaha, terutama yang ada di dalam negeri. Pasalnya, mereka diuntungkan dalam pembangunan dan pengembangan usaha mereka pada kawasan ekonomi yang sangat spesial ini.

Sebelumnya, ada baiknya kita mengetahui latar belakang penciptaan KEK di Tanah Air ini. Pada tahun 2021, struktur ekonomi di Indonesia secara spasial masih didominasi oleh kelompok Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 57,89%. Kondisi itu menciptakan kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Di sinilah salah satu tujuan pengembangan KEK, yaitu untuk mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia sekaligus kontribusinya terhadap PDB. Para investor pun mendapat kesempatan untuk mengusulkan wilayah-wilayah di dalam negeri yang berpotensi menjadi kawasan ekonomi khusus.

Dengan berinvestasi atau mengembangkan bisnis di KEK, pelaku atau badan usaha seperti telah disebutkan sebelumnya akan memperoleh sejumlah fasilitas fiskal dan nonfiskal. Fasilitas fiskal merupakan fasilitas yang menyangkut peraturan



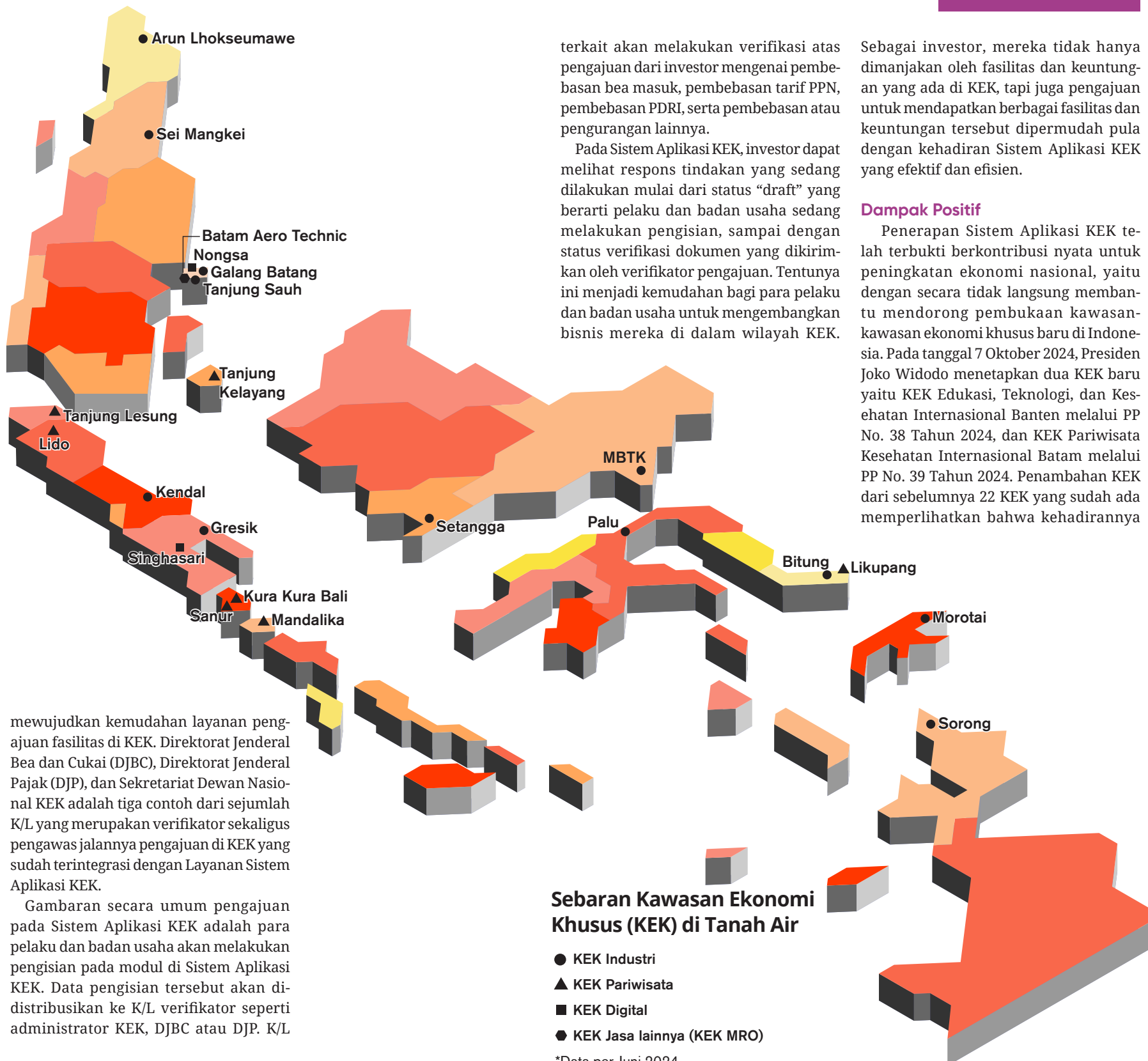
atau regulasi perpajakan, bea, cukai, dan pendapatan negara lainnya. Investor, umpama, akan dimanjakan dengan tidak dipungutnya Pajak dalam Rangka Impor (PDRI), penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan pembebasan bea masuk atas pemasukan mesin, peralatan dan bahan untuk periode waktu tertentu.

Sementara itu, fasilitas nonfiskal bagi investor KEK, antara lain bisa berupa kemudahan sarana dan prasarana pembangunan investasi, atau dukungan pemerintah daerah lewat pengurangan pajak dan retribusi daerah dan komitmen untuk pengoperasian administrator KEK. Investor juga bisa menikmati kemudahan perizinan lalu lintas barang, kemudahan dan keringanan imigrasi bagi orang asing pelaku bisnis, kemudahan memperoleh tenaga kerja, kemudahan pengurusan pertanahan dan atas kepemilikan haknya dan pembebasan lahan, serta kepengurusan perizinan dan nonperizinan berusaha.

Tentunya semua fasilitas itu akan kembali merujuk pada peraturan yang berlaku, yaitu PP No. 40 Tahun 2021. Untuk mendapatkan semua fasilitas dan keuntungan tersebut, di sinilah Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) membantu para pelaku maupun badan usaha dalam hal administrasi pengajuan layanan fasilitas terkait. SINSW menyediakan aplikasi satu pintu berbasis *single submission* atau satu kali pengajuan pada satu sistem.

Pelaku atau badan usaha hanya perlu mengakses Sistem Aplikasi KEK pada SINSW yang telah terintegrasi pada seluruh sistem kementerian atau lembaga (K/L) terkait. Layanan ini memudahkan mereka untuk melakukan pengajuan fasilitas dan memantau perkembangannya dengan hanya satu aplikasi saja. Di sisi lain, layanan Sistem Aplikasi KEK tersebut juga mempermudah K/L untuk melakukan verifikasi serta pengawasan terhadap pengajuan fasilitas KEK.

Dalam praktiknya, Sistem Aplikasi KEK bersinergi dengan berbagai K/L untuk



terkait akan melakukan verifikasi atas pengajuan dari investor mengenai pembebasan bea masuk, pembebasan tarif PPN, pembebasan PDRI, serta pembebasan atau pengurangan lainnya.

Pada Sistem Aplikasi KEK, investor dapat melihat respons tindakan yang sedang dilakukan mulai dari status “draft” yang berarti pelaku dan badan usaha sedang melakukan pengisian, sampai dengan status verifikasi dokumen yang dikirimkan oleh verifikasi pengajuan. Tentunya ini menjadi kemudahan bagi para pelaku dan badan usaha untuk mengembangkan bisnis mereka di dalam wilayah KEK.

Sebagai investor, mereka tidak hanya dimanjakan oleh fasilitas dan keuntungan yang ada di KEK, tapi juga pengajuan untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan keuntungan tersebut dipermudah pula dengan kehadiran Sistem Aplikasi KEK yang efektif dan efisien.

### Dampak Positif

Penerapan Sistem Aplikasi KEK telah terbukti berkontribusi nyata untuk peningkatan ekonomi nasional, yaitu dengan secara tidak langsung membantu mendorong pembukaan kawasan-kawasan ekonomi khusus baru di Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo menetapkan dua KEK baru yaitu KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten melalui PP No. 38 Tahun 2024, dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam melalui PP No. 39 Tahun 2024. Penambahan KEK dari sebelumnya 22 KEK yang sudah ada memperlihatkan bahwa kehadirannya

mewujudkan kemudahan layanan pengajuan fasilitas di KEK. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Sekretariat Dewan Nasional KEK adalah tiga contoh dari sejumlah K/L yang merupakan verifikasi sekaligus pengawas jalannya pengajuan di KEK yang sudah terintegrasi dengan Layanan Sistem Aplikasi KEK.

Gambaran secara umum pengajuan pada Sistem Aplikasi KEK adalah para pelaku dan badan usaha akan melakukan pengisian pada modul di Sistem Aplikasi KEK. Data pengisian tersebut akan didistribusikan ke K/L verifikasi seperti administrator KEK, DJBC atau DJP. K/L





Suasana senja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pantai Sanur, Bali.

disambut baik oleh seluruh investor, dan membuktikan bahwa kemudahan yang menyertai Sistem Aplikasi KEK membawa dampak sangat positif, tidak hanya untuk para investor, tetapi juga masyarakat. Ke depan, akan ada penambahan delapan KEK baru yang saat ini sedang dalam proses penetapan.

Setiap investor yang berdatangan untuk berinvestasi pada KEK akan memperbanyak lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab

IX mengenai Klaster Kawasan Ekonomi yang memudahkan para pelaku usaha dan badan usaha untuk merekrut tenaga kerja dengan efisiensi birokrasi. Adapun setiap pelaku dan badan usaha yang sudah menyerap tenaga kerja dan melakukan kegiatan bisnis untuk perusahaannya dapat melakukan pengajuan melalui Sistem Aplikasi KEK untuk mendapatkan kemudahan fiskal. Dengan demikian, pemerintah telah membuat kemudahan yang berkesinambungan ditambah dengan kontribusi Sistem Aplikasi KEK yang membawa dampak ekonomi yang sangat baik bagi pendapatan negara.

Secara kumulatif, sejak adanya KEK hingga Juni 2024, 22 KEK yang telah ada mencatatkan investasi senilai Rp205,2 triliun. Sementara itu, tenaga kerja yang telah diserap di seluruh KEK sejumlah 132.227 tenaga kerja oleh 368 pelaku usaha yang aktif. Kemudian, setelah adanya dua KEK baru, nilai investasi bertambah signifikan. Tercatat, jumlah pelaku usaha dan badan usaha yang menggunakan Sistem Aplikasi KEK sebanyak 238 perusahaan dengan nilai investasi Rp242 triliun.

Sejalan dengan kebutuhan investor, pada 2024, dua modul baru telah ditambahkan pada Sistem Aplikasi KEK. Dengan

begitu, kini ada total 10 modul pada aplikasi tersebut. Dua modul baru itu adalah Pemberitahuan Kawasan Ekonomi Khusus pengeluaran ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabea, serta Perizinan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan.

Di masa mendatang, pengembangan Sistem Aplikasi KEK akan senantiasa berlanjut agar terus mendatangkan dampak positif yang lebih besar, bukan hanya bagi pelaku atau badan usaha, melainkan juga bagi seluruh masyarakat. Dengan begitu, daya saing ekonomi nasional akan semakin kuat dan perekonomian Indonesia pun kian melesat. ■





# Duet Simbara dan Sistem PAB Tambal Kebocoran

Oleh  
Amirudin

INDONESIA dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan mineral dan batu bara (minerba) terbesar di dunia, menjadikannya pemain kunci dalam industri energi global. Kekayaan sumber daya alam ini tidak hanya menjadi tulang punggung sektor energi domestik, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Setiap perusahaan yang mengambil manfaat dari penambangan minerba memiliki kewajiban untuk membayar PNBP royalti provisional minerba kepada negara. Sebagai bukti pembayaran PNBP, negara menerbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN ini penting untuk mencatat penerimaan negara secara akuntabel, serta menjadi dasar pelaporan dan pengawasan dalam pengelolaan sektor minerba.

Namun disayangkan, terdapat upaya penghindaran pembayaran royalti provisional minerba yang sering kali terjadi melalui manipulasi dokumen dan pelaporan pada proses pengapalan minerba. Modus yang umum dilakukan adalah dengan penggunaan NTPN yang tidak valid, jumlah komoditas minerba melebihi volume NTPN, penggunaan NTPN yang sama berkali-kali, atau jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar. Akibatnya, negara terus dirugikan setiap tahunnya.

## Simbara: Fondasi Tata Kelola Penerimaan Minerba

Pemerintah telah mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Komoditas Mineral dan Batubara antarkementerian/lembaga (Simbara). Diluncurkan pada 8 Maret 2022, Simbara merupakan hasil sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga, dengan tujuan utamanya untuk menciptakan ekosistem pengelolaan minerba yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pada setiap pemanfaatan minerba, pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya terhadap negara.

Sebelum akhirnya terintegrasi dalam Simbara, penyelenggaraan kewenangan pengelolaan sektor minerba berjalan pada sistem masing-masing kementerian/lembaga secara sektoral, dengan gambaran sebagai berikut:

No	Kementerian/Lembaga	Kewenangan sektor minerba	Sistem Aplikasi
1	Kementerian ESDM	Perizinan, pengendalian produksi penjualan, pembayaran PNBP	MODI, MOMS-MVP, dan e-PNBP
2	Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Anggaran	Pengelolaan PNBP	SIMPONI
3	Kementerian Perdagangan	Pengendalian perizinan dan pengawasan atas kebijakan ekspor	INATRADE
4	Kementerian Keuangan – Lembaga National Single Window	Validasi perizinan larangan dan pembatasan ekspor	SINSW
5	Kementerian Keuangan – Ditjen Bea dan Cukai	Pengawasan kepabeanan	CEISA
6	Kementerian Perhubungan	Keamanan dan keselamatan pengangkutan	INAPORTNET
7	Bank Indonesia	Pengawasan lalu lintas devisa ekspor	SIMODIS

Pascapenerapan Simbara, semua sistem yang terlibat dalam tata kelola minerba dari hulu hingga hilir menjadi terhubung. Keterhubungan tersebut membuka banyak jalan yang bisa diambil oleh pemerintah guna meningkatkan pengawasan. Sebagai contoh, mekanisme pengawasan ekspor batu bara yang menjadi semakin memadai.

Secara sederhana, gambaran mekanisme pengawasan ekspor batu bara dideskripsikan sebagai berikut. Untuk ekspor batu bara, diperlukan pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Syarat PEB adalah Laporan Surveyor (LS). Syarat LS adalah NTPN pembayaran PNBP royalti provisional minerba. Untuk mendapatkan akses pembayaran, tentu harus melalui proses izin usaha. Rantai panjang validasi inilah yang diintegrasikan oleh Simbara. Alhasil, terciptalah mekanisme *chek and balance* pengamanan hak keuangan negara yang memadai, khususnya pada sektor ekspor batu bara.





FOTO: DOK. KEMENKO MARVES

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui SIMBARA.

Perubahan paling menonjol pasca-implementasi Simbara adalah adanya penyematan elemen data NTPN pada setiap dokumen transaksi distribusi minerba, baik tujuan ekspor maupun domestik. Dengan demikian, Simbara mendeteksi pergerakan arus barang dan melakukan ekualisasi atas pemanfaatan NTPN. Hasil ekualisasi data dapat dijadikan bahan analisis dalam pemenuhan hak negara.

Kabar baiknya, pada tahun 2024, ruang lingkup Simbara bahkan tidak lagi hanya berkutat pada tata kelola komoditas batu

bara sebagaimana pada pengembangan awalnya. Lebih jauh lagi, sistem itu kini telah mencakup komoditas nikel dan timah dengan total 27 *item HS code*, dan akan terus diperluas. Hal ini menjadikan Simbara semakin mantap sebagai fondasi tata kelola minerba.

#### Potensi Bocor Sektor Domestik

Kendati demikian, kemantapan mekanisme pengawasan pada sektor ekspor belum lah mengatasi seluruh potensi permasalahan tata kelola minerba. Ma-

sih ada celah peluang *fraud* pada sistem pengawasan pengapalan domestik yang saat ini terbangun.

Alokasi penjualan minerba di dalam negeri yang cukup besar membuat potensi pelanggaran ikut menggembung. Mengutip data statistik dari Kementerian ESDM, realisasi penjualan domestik batu bara tahun 2024 tercatat sebesar 378,95 juta ton atau 53,2% dari total produksi sebesar 831,05 juta ton.

Modus berupa penyelewengan NTPN royalti tujuan pemasaran lokal digunakan untuk ekspor ataupun modus penggunaan NTPN berulang melebihi kuotanya, tentu saja harus diwaspadai.

Mengingat kembali pada tahun 2018, Indonesia Corruption Watch dalam kajiannya mengindikasikan transaksi batu bara (ekspor) yang tidak dilaporkan sebesar Rp365,3 triliun. Kondisi itu berdampak adanya indikasi kerugian negara baik dari kewajiban perusahaan batu bara untuk Pajak Penghasilan maupun Royalti sebesar Rp133,6 triliun.

Saat ini, mekanisme pengawasan perdagangan antarpulau di sektor minerba mengandalkan integrasi antara Simbara dan data pengapalan barang domestik yang dilaporkan oleh agen pelayaran pada sistem Inaportnet atau Single Submission Pengangkut. Elemen data NTPN royalti provisional minerba menjadi elemen data yang wajib disampaikan oleh agen pelayaran sebagai syarat penerbitan persetujuan berlayar oleh Kementerian Perhubungan. Namun demikian, validasi atas NTPN ini hanya sebatas kebenaran data, belum sampai pada validasi volume NTPN-nya sehingga belum dapat mencegah risiko penggunaan NTPN berulang.

Penggunaan NTPN berulang adalah kelemahan yang jamak terjadi karena agen pelayaran sebagai pihak yang dititipi barang, tidak mengetahui detail informasi yang cukup mengenai dari komoditas yang diangkutnya. Informasi lengkap mengenai komoditas dikuasai oleh pemilik barang, dalam hal ini adalah

penambang atau *trader* minerba.

#### Terintegrasi dengan Sistem PAB

Sistem Pemberitahuan Antarpulau Barang (PAB) atau yang biasa disebut sebagai Manifes Domestik, merupakan bagian dari Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), yang dibangun oleh pemerintah sebagai instrumen penting dalam memantau distribusi komoditas melalui pengapalan domestik. Sistem ini digunakan oleh pemilik barang untuk memberitahukan data detail pengirim, penerima, dan barang yang diangkut.



Kabar baiknya, pada tahun 2024, ruang lingkup Simbara bahkan tidak lagi hanya berkutat pada tata kelola komoditas batu bara sebagaimana pada pengembangan awalnya. Lebih jauh lagi, sistem itu kini telah mencakup komoditas nikel dan timah dengan total 27 *item HS code*, dan akan terus diperluas. Hal ini menjadikan Simbara semakin mantap sebagai fondasi tata kelola minerba.

Sistem PAB telah mulai diimplementasikan pada tahun 2022 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau. Sebagai pengembangannya, pada tahun 2024, kerja sama LNSW dan Kemendag berhasil mengintegrasikan Simbara dengan Sistem PAB untuk





FOTO: DOK. KEMENKO MARVES

meningkatkan pengawasan distribusi domestik minerba.

Manfaat dari integrasi kedua sistem tersebut tidak hanya meningkatkan validitas NTPN, tetapi juga menutup celah penyalahgunaan NTPN royalti tujuan pemasaran lokal untuk ekspor serta penggunaan NTPN berulang.

### Melibatkan Pelindo

Permasalahan perbaikan tata kelola minerba ternyata belum usai. Rendahnya pemanfaatan Sistem PAB pada kurun tahun 2022 s.d. 2024 menjadi tantangan baru. Hal ini melatarbelakangi pemerintah melakukan penyesuaian regulasi perdagangan antarpulau, dengan menerbitkan Permendag No. 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau yang sekaligus mencabut Permendag No. 92

Tahun 2020. Kebijakan baru yang diusung untuk meningkatkan pemanfaatan Sistem PAB itu antara lain dengan menjadikan PAB sebagai syarat memasukkan barang ke dalam pelabuhan untuk tujuan pengiriman antarpulau, sebagaimana wajibnya Nota Pelayanan Ekspor (NPE) atas masuknya barang ekspor ke dalam pelabuhan.

Dalam penerapannya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) turut dilibatkan. Pelindo berperan menyesuaikan proses bisnis kepelabuhanan dan mengintegrasikan sistem Pelindo terhadap Sistem PAB guna memastikan sistem Pelindo mampu memverifikasi pemasukan barang ke dalam pelabuhan sesuai kebijakan dalam Permendag No. 27 Tahun 2024.

Guna memberi kesempatan untuk penyesuaian sistem, sosialisasi kebijakan bagi pengelola pelabuhan dan pelaku

usaha, pemberlakuan PAB sebagai syarat masuk pelabuhan diterapkan secara bertahap. Kebijakan itu akan dimulai pada 1 Februari 2025 di lima pelabuhan Pelindo dan ditargetkan terimplementasi pada seluruh pelabuhan pada tahun 2026.

Upaya ini tentunya akan memperkuat tata kelola komoditas minerba, terutama terkait pengawasan pengangkutan minerba dalam negeri. Dampaknya, pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP atas komoditas minerba yang beredar di dalam negeri dapat diawasi dengan lebih baik guna terealisasinya optimalisasi PNBP dari sektor minerba.

### Prospek Simbara

Ke depan, Simbara diharapkan akan semakin berkembang, bukan hanya untuk sektor batu bara, nikel, dan timah, melain-

kan juga untuk sektor minerba lainnya seperti tembaga, bijih besi, emas, dan bauksit. Pengembangan sistem ini akan semakin memperkuat pengawasan terhadap distribusi komoditas, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Peningkatan pemanfaatan Sistem PAB yang terintegrasi dengan Simbara juga menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola minerba yang semakin transparan. Sistem kepelabuhanan, baik BUMN maupun swasta, perlu disiapkan untuk menyongsong implementasi Sistem PAB secara menyeluruh pada 2026.

Dengan sinergi ini, pemerintah tidak hanya mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga akan menjadi contoh bagaimana teknologi dan kolaborasi lintas instansi dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. ■





# Masa Depan ASEAN Single Window

Oleh  
Cecilia Eny Pratiwi

SEJAK tahun 2005, sejumlah negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah merintis dan mengembangkan ASEAN Single Window (ASW). ASW menciptakan lingkungan yang dapat beroperasi untuk menghubungkan dan mengintegrasikan *national single window* masing-masing negara ASEAN di tingkat regional. Pembentukan dan pengoperasian ASW didukung oleh tiga perjanjian atau protokol regional, yaitu Persetujuan Pembentukan dan Penerapan ASEAN Single Window yang ditandatangani pada 5 Desember 2005, Protokol Pembentukan dan Pelaksanaan ASEAN Single Window yang ditandatangani pada 20 Desember 2006, dan Protokol Kerangka Hukum Implementasi ASEAN Single Window yang ditandatangani pada 4 September 2015.

Sedari diluncurkan pada tahun 2018 dan beroperasi

penuh pada tahun 2019, ASW telah memberikan manfaat bagi sektor publik dan swasta di kawasan. ASW mempercepat proses perizinan kargo dan mendorong integrasi ekonomi ASEAN dengan memungkinkan pertukaran dokumen terkait perdagangan lintas batas secara elektronik di antara AMS (*ASEAN member states*). Dikutip dari *AntaraNews*, ASW dapat menghemat lebih dari US\$6,5 miliar bagi para *trader* di ASEAN, mengurangi waktu transit rata-rata empat hari per transaksi, dan memfasilitasi pertukaran lebih dari 4,4 juta dokumen elektronik hingga periode 2023.

## Perkembangan ASW

ASW didasarkan pada prioritas kebijakan atas kesepakatan seluruh AMS yang implementasinya ditentukan di forum ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC). ASWSC memegang peran penting dalam mengawasi keseluruhan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang diperlukan untuk pengoperasian ASW yang efektif, juga kebutuhan pengembangan ASW di masa depan.

Forum ASWSC didukung oleh forum yang membahas mengenai persyaratan teknis dan hukum, yaitu The Working Group on Technical Matters for The ASW (TWG) dan The Working Group on Legal and Regulatory Matters for The ASW (LWG). LNSW selaku institusi yang mengelola Indonesia National Single Window (INSW) dan menyelenggarakan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) menjadi *focal point* dalam semua forum ASW.

Isu operasional, implementasi dan rencana kerja dari masing-masing teknis pertukaran dokumen elektronik dibahas dalam forum TWG yang diselenggarakan empat kali dalam setahun. Sampai sekarang, pertukaran dokumen elektronik di ASEAN berfokus pada intra-ASEAN. Dokumen yang telah berhasil dipertukarkan adalah Surat Keterangan Asal (SKA)

elektronik yang dikenal sebagai ATIGA e-Form D dan ASEAN Customs Declaration Document (ACDD). Per akhir tahun 2023, pertukaran dokumen elektronik Sertifikat Phytosanitary (e-phyto) telah berhasil dilakukan oleh Indonesia dan Thailand, menyusul Filipina yang bergabung di tahun 2024.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa negara yang menyatakan keinginan untuk melakukan pertukaran dokumen elektronik dengan ASEAN. Membawa semangat *The ASEAN Way*, tentunya pertukaran data dengan negara mitra wicara tersebut harus melalui kesepakatan seluruh negara anggota ASEAN. Dengan semangat fasilitasi perdagangan, pada prinsipnya para pimpinan tertinggi menyambut baik inisiatif tersebut, namun perlu diperhatikan sisi kebijakan, legal dan teknisnya.

Secara garis besar, ASW dapat digambarkan sebagai jaringan dari 10 *node gateway* yang berbeda. Setiap *node* dikonfigurasi untuk terhubung secara langsung satu sama lain dengan cara *peer-to-peer*. Adapun setiap koneksi adalah koneksi *point to point*. Dalam pertukaran data, setiap AMS perlu menguji sembilan koneksi (N-1) ke negara ASEAN lainnya. Konfigurasi ini akan bertambah rumit ketika menambahkan negara baru, misalnya mitra wicara. Dalam hal ini, setiap negara baru perlu menguji koneksinya dengan 10 AMS. Melihat perkembangan teknologi saat ini, bukan tidak mungkin terdapat perbedaan pilihan dan maturitas teknologi antara ASEAN dan negara mitra.

Selain teknologi, tentunya sisi legal perlu mendapat sorotan karena dasar setiap pertukaran data adalah regulasi yang disepakati 10 negara AMS. Oleh karena itu, forum LWG diaktifkan kembali pada 2023 setelah vakum selama lebih dari sembilan tahun. Dalam perannya di forum LWG, LNSW didapuk menjadi *chairman* di forum triwulanan ini. Fokus



dari pembahasan di LWG adalah permasalahan regulasi atau perjanjian untuk memudahkan ASEAN dalam mengembangkan ASW, termasuk kerangka hukum kerja sama dengan mitra wicara yang tidak terbatas hanya pertukaran data saja. Pada semester pertama 2024, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pertemuan LWG di Jakarta.

Dalam praktiknya, forum-forum ASW berkoordinasi dengan forum lain di ASEAN, terutama dengan forum pengampu dokumen elektronik yang dipertukarkan. Delegasi RI yang berperan dalam perundingan forum ASW pun juga secara formal dan informal berkoordinasi dan meminta pandangan dari kementerian/lembaga terkait dalam upaya menyamakan posisi Indonesia di berbagai forum di ASEAN.

### Jalan Panjang ASW

ASW dipandang sebagai katalisator untuk perdagangan lintas batas tanpa kertas yang memungkinkan akselerasi penyelesaian transaksi tanpa mengubah sifat-sifat dari dokumen itu sendiri. Dalam upaya untuk mendukung semua jenis dokumen agar dapat dipertukarkan dalam lingkup ASW, perlu pendekatan inklusif untuk memahami bagaimana NSW masing-masing AMS memproses data yang dapat diwujudkan salah satunya melalui pendekatan teknologi.

Awalnya, forum ASW berfokus pada isu teknologi dan operasional dalam rencana pengembangan teknis ASW. Setiap AMS mempertimbangkan *grand design* ASW ke depannya seperti apa. Kemudian, menyusul adanya wacana koneksi dengan mitra wicara, muncul tuntutan agar ASW memiliki keunggulan lebih dalam interoperabilitas, skalabilitas, dan keamanan yang mencakup privasi data dan keamanan siber.

Lebih lanjut, opsi *technology neutral* muncul dalam diskusi dengan mengutamakan *open architecture* yang memungkinkan pengembangan dan pemeliharaan

yang berkelanjutan. Berbagai teknologi dapat dipertimbangkan untuk memfasilitasi pertukaran data, antara lain SOAP (*Simple Object Access Protocol*), SFTP (*Secure File Transfer Protocol*), *block-chain*, atau teknologi lainnya.

Perlu disadari bahwa teknologi merupakan alat untuk mewujudkan alur proses bisnis yang telah disepakati. Terlepas dari teknologi yang digunakan, proses bisnis dalam pertukaran data antarnegara juga perlu mendapat perhatian, bahkan jika dimungkinkan perlu untuk disimplifikasi. Hal ini termasuk juga proses bisnis pertukaran data antara ASEAN dan mitra wicara. Ke depannya, salah satu atribut yang diinginkan dari ASW ialah agar dapat meminimalisasi gangguan operasional yang berasal dari proses bisnis yang dianggap terlalu ruwet.

Namun, ekspektasi atas teknologi dan proses bisnis ini harus mengacu pada dasar hukum yang ada. Mengingat AMS memiliki perbedaan sistem hukum yang diberlakukan di masing-masing negara, tentunya akan menarik jika diskusi diperlebar mencakup regulasi pertukaran data antara ASEAN dan mitra wicara. Salah satu target ASEAN adalah menyepakati instrumen hukum untuk panduan solusi jangka panjang rencana pertukaran dokumen elektronik dengan *dialogue partners*.

Nantinya, instrumen hukum tersebut mencakup kewajiban dan tata kelola kerja sama terkait *single window*, hukum digital yang mengatur transfer arsip elektronik melalui *single window*, dan hukum perdagangan/bisnis terkait dengan pertukaran setiap dokumen yang dipertukarkan dalam jaringan *single window*. Terlebih lagi jika dasar hukum pembentukan dan pengoperasian ASW dikaitkan dengan acuan hukum global untuk memfasilitasi perdagangan tanpa kertas lintas batas.

Solusi legal ini akan bervariasi dari satu negara ke negara yang lain, dengan memperhatikan apakah sudah ada kerja sama perdagangan atau kerja sama lainnya, do-



kumen apa yang akan dipertukarkan, dan hal lain yang terkait. ASEAN, terutama pengampu ASW, perlu mengambil posisi dalam upaya mendukung fasilitasi perdagangan yang digaungkan di setiap aktivitas perdagangan internasional.

Hal serupa dapat diterapkan dalam pembahasan mengenai transaksi Bisnis-ke-Pemerintah (B2G) dan Bisnis-ke-Bisnis (B2B). Pada praktiknya, isu ini dibahas di forum ASEAN lainnya, yang secara tidak langsung berkaitan dengan eksistensi ASW sebagai inisiatif yang dianggap sudah *well established*. Tentunya ASEAN memerlukan analisis lebih lanjut dari sisi teknis dan legal. Tingkat kesiapan dan maturitas teknologi masing-masing akan berbeda satu sama lain, begitu pula kesiapan dari regulasi domestik.

Sejalan dengan ide-ide pengembangan ASW, salah satu *Priority Economic Deliverable* (PED) yang diangkat dalam keputusan Lao PDR di ASEAN di tahun 2024 adalah *The Study of New Generation of ASEAN Single Window*. Studi ini berfokus pada visi baru agar ASW lebih terbuka, inklusif dan dijalankan dengan prinsip interoperabilitas yang akan memungkinkan kemudahan konektivitas dan pertukaran dokumen elektronik.

Tujuan dari studi ini adalah untuk

menghasilkan penilaian terhadap kondisi ASW terkini serta merekomendasikan opsi-opsi pengembangannya di masa mendatang, termasuk konektivitas dengan mitra wicara.

Secara lebih spesifik, studi ini mengeksplorasi pertimbangan kebijakan, hukum, dan teknis yang terkait dengan pengembangan ASW generasi berikutnya. Studi ini difinalisasi pada Desember 2024 dan nantinya akan di-*endorse* pada forum ASEAN Economic Minister (AEM) Retreat dan ASEAN Finance Minister Meeting (AFMM). Hasil analisis ini akan melengkapi tujuan utama Peta Jalan Bandar Seri Begawan bagi ASEAN untuk mempercepat inisiatif di bidang fasilitas perdagangan dan digitalisasi ekonomi.

Dengan pencapaian sedari pertama implementasi sampai saat ini, ASW telah membuktikan peran krusialnya dalam mendukung fasilitasi perdagangan. Bertolak dari kemajuan yang sudah dicapai, ASW memiliki potensi berperan lebih besar di perdagangan internasional, bahkan bisa masuk ke ranah strategis lain, seperti *supply chain* dan *paperless trade*. Dengan menjunjung semangat *The ASEAN Way*, negara-negara ASEAN perlu terus bekerja sama dalam mencapai konsensus untuk pengembangan ASW di masa depan. ■





# Kiprah Indonesia dalam Pertukaran Data Internasional

Oleh  
Cecilia Eny Pratiwi

JIKA ditilik dari rekomendasi United Nations (2013), terdapat lima tahapan dalam pengembangan *single window*. Pertama, *paperless customs*. Kedua, *regulatory single window*. Ketiga, *port single window or B2B port community system*. Keempat, *fully integrated single window*, dan terakhir, *cross border single window exchange platform*. Dari lima tahapan tersebut, secara historis, Indonesia National Single Window (INSW) tidak melewati semuanya sesuai urutan, melainkan dikembangkan pada waktu yang hampir bersamaan ataupun berdasarkan pada mandat dari arah kebijakan nasional dan perjanjian internasional yang ada.

United Nations juga memberi gambaran besar manfaat dari adanya *single window* untuk memfasilitasi perdagangan antarnegara. World Trade Organization

melalui Trade Facilitation Agreement (WTO TFA) pun mengeluarkan daftar yang mendukung fasilitasi perdagangan internasional yang diikuti oleh seluruh negara anggota WTO. Article 10.4 secara spesifik mengatur mengenai pengembangan dan implementasi *single window*, dan Indonesia sudah memenuhi notifikasi A untuk artikel tersebut.

Merujuk hal tersebut, salah satu potensi terbesar yang diperoleh dengan adanya INSW adalah peningkatan efisiensi dalam proses perdagangan internasional. Sebelumnya, perusahaan dan pemerintah harus mengelola berbagai jenis dokumen dan data yang tersebar di banyak instansi, yang sering kali menimbulkan keterlambatan dan biaya tinggi.

Melalui INSW, seluruh data yang diperlukan dapat diproses dalam satu platform, mulai dari pemberitahuan impor, ekspor, izin perdagangan. Semua data ini juga memiliki potensi untuk dapat ditukar secara elektronik dengan negara mitra perdagangan Indonesia. Proses tersebut memungkinkan Indonesia untuk terhubung dengan sistem serupa yang ada di negara lain, menciptakan kemudahan dalam melakukan transaksi antarnegara.

Penggunaan sistem elektronik dalam pertukaran data juga memberi fleksibilitas bagi otoritas terkait di berbagai negara bersangkutan untuk memverifikasi dan memproses dokumen dalam waktu lebih singkat. Manfaat lainnya adalah peningkatan keamanan dan kepatuhan dalam perdagangan internasional mengingat pemantauan aliran barang yang masuk dan keluar dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga bisa mengurangi risiko penyalahgunaan atau penipuan dalam perdagangan internasional. Pemerintah dapat juga menggunakan data yang terkumpul untuk melakukan analisis dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan internasional, serta mengidentifikasi potensi maupun risiko dari transaksi yang ada.

Dari sisi pelaku usaha, pertukaran data

secara digital bisa mengurangi biaya transaksi yang sebelumnya terkait dengan pengolahan dokumen secara manual, pengiriman dokumen fisik, atau biaya penundaan di perbatasan. Umumnya, setiap negara menyediakan suatu *tools* untuk *track and trace* sehingga pelaku usaha dapat memantau status pengiriman ke negara tujuan secara *real-time* dengan informasi yang disediakan.

*Benefit* lainnya adalah penguatan kerja sama dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini dapat dilihat dari sisi politis maupun ekonomi, yang tentunya semakin mempererat hubungan negara yang melakukan pertukaran data. Kerja sama umumnya disusun atas dasar prinsip manfaat bersama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*).

## Indonesia dan Negara Mitra

Perdagangan internasional adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian global. Dalam era globalisasi ini, perkembangan teknologi digital memungkinkan proses perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang sangat berperan dalam hal ini adalah sistem pertukaran data internasional yang terintegrasi, seperti ASEAN Single Window (ASW) yang merupakan inisiatif penting ASEAN untuk mempromosikan integrasi ekonomi regional, memfasilitasi perdagangan, dan meningkatkan konektivitas di antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, Kamboja, Singapura, Myanmar, Laos, dan Brunei Darussalam. Dengan tujuan mengurangi waktu, biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam menangani prosedur kepabeanan dan perdagangan, ASW dibangun dengan dasar mengintegrasikan *national single window* masing-masing negara-negara ASEAN.

Hingga tahun 2024, telah banyak capaian yang diperoleh dalam kerangka kerja sama regional ASEAN. Dimulai di tahun



2019, Indonesia bersama anggota ASEAN lainnya berhasil melakukan pertukaran Surat Keterangan Asal elektronik (e-Form D) di bawah perjanjian ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Selang waktu empat tahun kemudian, ASEAN menyepakati implementasi pertukaran e-Form D secara penuh yang merupakan salah satu *outcome* dari *Priority Economic Deliverable* dalam keketuaan Indonesia di ASEAN. Selain itu, pertukaran ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) telah berhasil dilakukan Indonesia dengan negara AMS lainnya yang dimanfaatkan untuk fungsi manajemen resiko. Indonesia, Thailand dan Philipina telah melakukan pertukaran Electronic Sanitary and Phytosanitary Certificate (e-SPS) melalui ASW. Dokumen selanjutnya yang berpotensi dilakukan pertukaran adalah Electronic Animal Health Certificate dan dokumen lainnya.

Melihat potensi pengembangan pertukaran data dengan negara-negara mitra wicara terbuka lebar, Indonesia memperluas kerja samanya agar tidak hanya berfokus pada dokumen di tingkat regional ASEAN. Pada 2019, Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Cina terkait pertukaran data elektronik Surat Keterangan Asal (SKA) telah ditandatangani dan diberlakukan secara efektif untuk e-Form E pada tahun berikutnya.

Di tahun yang sama, Indonesia juga berhasil melakukan pertukaran data elektronik e-Form AK dengan Korea Selatan. Sebagaimana implementasi SKA elektronik, penggunaan e-Form memberikan hasil dalam percepatan impor dan ekspor, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan ekspor ke negara tujuan.

Tidak hanya berhenti di situ, berdasarkan kesepakatan kerja sama Indonesia Australia Comprehensive Partnership Agreement (IACEPA), Indonesia memberlakukan skema *tariff rate quota* (TRQ) dan pengiriman sertifikat TRQ dari Australia dilakukan melalui SINSW sejak 2020. Indonesia dan Jepang juga bersepakat dan



menerapkan pertukaran SKA elektronik (e-Form JIEPA) pada 2023 berdasarkan *upgrading* perjanjian Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Lebih lanjut pada tahun 2024, pertukaran e-Form IK (Indonesia-Korea) juga berhasil dilaksanakan secara bilateral oleh kedua belah pihak.

Sedikit berbeda dengan perjanjian perdagangan lainnya, negara EFTA dan UAE menyerahkan pemberlakuan TRQ kepada Indonesia, sehingga prosedur di dalamnya berpusat pada kementerian/lembaga domestik tanpa campur tangan negara mitra. Selain memfasilitasi pertukaran data internasional dan berperan dalam implementasi kerja sama perdagangan, sebagai upaya transparansi, pengguna jasa dapat melakukan penelusuran secara mandiri atas status dokumen e-SKA serta pengecekan sisa kuota atas TRQ masing-masing perjanjian di laman situs [www.insw.go.id](http://www.insw.go.id).

Melihat pengalaman Indonesia dalam pertukaran data dengan negara lain, bukan tidak mungkin ke depannya akan ada banyak kegiatan serupa di level bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam

beberapa forum perundingan yang sedang berlangsung, Indonesia membawa semangat yang sama dengan mendorong pertukaran data dan penggunaan *e-form*, misal elektronik SKA, dalam kerja sama perdagangan internasional.

Selain dari sisi kerja sama perdagangan, potensi interoperabilitas dengan negara lain juga terbuka lebar dengan diwajibkannya negara anggota International Maritime Organization (IMO) untuk menggunakan satu platform digital terpusat atau Maritime Single Window (MSW) untuk mengumpulkan dan bertukar informasi dengan kapal-kapal ketika mereka bersandar di pelabuhan. Hal ini ditujukan untuk menyederhanakan prosedur untuk kedatangan, masa tinggal, dan keberangkatan kapal serta meningkatkan efisiensi pelayaran di seluruh dunia. Kewajiban tersebut tertuang dalam Amendemen Konvensi FAL tentang pertukaran data elektronik wajib di pelabuhan untuk izin kapal.

Walaupun kewajiban ini telah ditargetkan pada 1 Januari 2024, pada praktiknya masih banyak negara yang belum siap secara infrastruktur. Indonesia sendiri

selalu menggunakan rujukan standar dan rekomendasi internasional dalam pengembangan SINSW untuk menjamin interoperabilitas dengan negara lain.

Meskipun sebagian besar *national single window* berkaitan dengan perdagangan internasional, terdapat kemungkinan perbedaan antara informasi serta dokumen yang digunakan suatu negara dan data yang dipertukarkan di antara negara-negara mitra. Oleh sebab itu, tentunya diperlukan pemetaan dan analisis lebih lanjut terkait negara yang berpotensi untuk dilibatkan dalam pertukaran data elektronik.

Lebih lanjut, ada beberapa kebutuhan khusus untuk interoperabilitas berdasarkan perjanjian antara ekonomi yang bertukar informasi terkait perdagangan luar negeri. Hal-hal ini harus diuraikan dalam perjanjian atau protokol untuk memastikan kejelasan tentang penggunaan informasi tersebut. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah tujuan interoperabilitas itu sendiri, yaitu agar pertukaran data dapat dilakukan secara akurat dan lengkap, dengan cepat, tanpa hambatan, dan aman sehingga dapat bermanfaat lebih bagi Indonesia. ■





# Indonesia Sebagai Rujukan Pembelajaran Konsep Single Window

Oleh  
**Ibrahim Khozi Baisa**

**S**INGLE window merupakan sistem yang memungkinkan para pelaku usaha untuk mengirimkan data dan dokumen secara elektronik melalui satu pintu guna memenuhi berbagai persyaratan peraturan terkait ekspor, impor, dan logistik. Implementasi *single window* berperan penting untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mengharmonisasikan prosedur perdagangan internasional. Dalam konteks World Trade Organization Trade Facilitation Agreement (WTO TFA), penyelenggaraan *single window* merupakan bentuk kepatuhan terhadap Article 10.4 WTO TFA yang merekomendasikan negara anggota untuk menerapkan sistem tersebut dalam memfasilitasi perdagangan.

Namun, penerapan *single window* bukanlah hal sederhana. Kompleksitas integrasi berbagai aspek membuat pengembangannya menantang. Dari segi teknologi, ketidakseragaman sistem teknologi informasi atau standar data antarinstansi pemerintah membuat pengintegrasian dalam platform *single window* menjadi sangat sulit. Selain itu, negara berkembang sering menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti konektivitas internet, keamanan data, dan kapasitas sistem yang memadai.

Di tengah tantangan ini, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam pengembangan *single window* yang diakui secara internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan Indonesia National Single Window (INSW) dan penyelenggaraan Sistem INSW (SINSW) tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi perdagangan domestik, tetapi juga aktif berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan berbagai negara melalui forum internasional.



Dalam beberapa tahun terakhir, Lembaga National Single Window (LNSW) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan Indonesia National Single Window (INSW) dan penyelenggaraan Sistem INSW (SINSW) tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi perdagangan domestik, tetapi juga aktif berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan berbagai negara melalui forum internasional."

## Dukungan kepada Timor Leste

Sejalan dengan keputusan KTT ASEAN ke-41 yang menerima Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11 secara prinsip, LNSW telah berkontribusi dalam program peningkatan kapasitas bagi aparat sipil negara (ASN) Timor Leste. Pada Agustus 2023, 10 ASN Timor Leste mengunjungi Kantor LNSW untuk mempelajari lebih dalam tentang sejarah, visi, misi, dan peran LNSW dalam mendukung komunitas ekonomi ASEAN, khususnya melalui ASEAN Single Window (ASW).

Dalam forum ASEAN, LNSW berperan aktif di ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC), yang mengawasi implementasi dan pengembangan ASW. LNSW juga terlibat dalam Working Group on Technical Matters dan Working Group on Legal and Regulatory Matters untuk memastikan sistem ASW berkembang sesuai kebutuhan. Dukungan teknis ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mempersiapkan Timor Leste menuju keanggotaan penuh ASEAN.

## Kontribusi dalam Forum Global: Pertukaran Data Elektronik

Pada Maret 2024, LNSW menjadi pembicara dalam *Consultation Meeting Regarding the Feasibility Study on the Interconnectivity Framework for the Certificate of Origin (CO)* yang diselenggarakan oleh World Customs Organization (WCO) di Shanghai.

Dalam forum tersebut, LNSW berbagi pengalaman dalam implementasi *cross border electronic data exchange*. Sejak 2019, Indonesia telah memfasilitasi pertukaran data elektronik, termasuk e-CoO Form D dalam kerangka ASEAN Trade in Goods Agreement, dan terus berkembang hingga mencakup dokumen seperti ACDD dan e-CoO Form IJ untuk perjanjian bilateral dengan Jepang.

Selain berbagi teknis tentang *message gateway* dan arsitektur data, Indonesia juga menyediakan fitur pelacakan dokumen e-CoO melalui laman resmi INSW. Fitur ini meningkatkan transparansi dan mempermudah pelaku usaha dalam memantau status dokumen mereka.



### Berbagi Pengalaman dengan Ghana Maritime Authority

Pada Juli 2024, Ghana Maritime Authority melakukan kunjungan untuk mempelajari penerapan sistem Single Submission (SSm) Pengangkut yang dikembangkan oleh LNSW dalam rangka penataan ekosistem logistik nasional (NLE). Sistem ini memungkinkan agen pelayaran untuk mengajukan dokumen secara satu kali melalui SINSW, yang kemudian didistribusikan secara otomatis ke kementerian/lembaga terkait.

Layanan ini menjadi salah satu dari empat pilar utama NLE yang mencakup simplifikasi proses, kolaborasi platform logistik, kemudahan pembayaran, dan tata ruang. Dengan pendekatan ini, Indonesia berhasil menghilangkan repetisi data, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi logistik secara nasional.

### Kunjungan Delegasi Tanzania

Pada Desember 2024, giliran delegasi Tanzania yang bertandang ke LNSW untuk mempelajari pengembangan SINSW. Kedatangan tersebut merupakan kali kedua, sebagai bagian dari upaya negara di Afrika bagian timur itu untuk membangun Tanzania Electronic Single Window System (TeSWS).

Tanzania terinspirasi oleh pendekatan kolaboratif Indonesia yang melibatkan 21 kementerian/lembaga dalam pengelolaan INSW. Delegasi Tanzania mengapresiasi Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018 yang memberikan landasan hukum kuat untuk keberlanjutan sistem ini, sebuah elemen penting yang ingin diterapkan di negara mereka.

### Kunjungan Kedutaan Pakistan dan Partisipasi pada Workshop on Information Communication Technology (ICT) for Customs Automation and Single Window

LNSW juga menerima kedatangan perwakilan Kedutaan Besar Pakistan, dalam hal ini dari Ministry Counselors of Trade and Investment, untuk mempelajari implementasi sertifikat elektronik asal barang (e-Certificate of Origin/e-CO). Pada kesempatan tersebut, LNSW mempresentasikan teknologi dan tata kelola yang mendukung pertukaran data elektronik lintas batas.

Dalam lokakarya *ICT for Customs Automation and Single Window*, LNSW berpartisipasi dalam pemberian materi terkait “Best Practice Implementation of Single Window”. Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan negara berkembang antara lain Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

### Membangun Masa Depan Digitalisasi Perdagangan

Keberhasilan Indonesia dalam mengelola *single window* tidak dicapai secara instan. LNSW bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan para pelaku usaha untuk memetakan proses bisnis, menyederhanakan prosedur, dan membangun sistem yang terintegrasi. Kemudian, melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi internasional, LNSW tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor digitalisasi perdagangan dan logistik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem yang lebih inklusif dan terintegrasi. “Indonesia menjadi tempat belajar,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam suatu kesempatan, menegaskan pentingnya berbagi pengalaman untuk mendukung pengembangan sistem serupa di negara-negara lain. ■







# INSWChain, Inovasi LNSW dalam Transformasi Digital

Oleh  
**Azzah Ratul Azizah**

**T**RANSFORMASI digital semakin hari semakin digaungkan oleh pemerintah sebagai usaha pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Lembaga Nasional Single Window (LNSW), yang merupakan lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan publik khususnya dalam bidang ekspor, impor, dan logistik, memahami pentingnya transformasi digital. LNSW dengan Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelolanya menjadi solusi pelayanan publik, khususnya dalam hal percepatan fasilitas perdagangan yang bersifat elektronik. Pelayanan tersebut memberikan kemudahan

dalam pengajuan dokumen perdagangan ke dalam atau luar negeri dengan satu titik masuk untuk memenuhi semua persyaratan regulasi terkait impor, ekspor, dan logistik tanpa adanya data yang terduplikasi.

Dokumen dan data yang dikirimkan melalui Sistem INSW (SINSW) menjadi satu-satunya pilihan utama sistem interaksi bagi pemerintah agar pelaku usaha di dalam maupun luar negeri tidak perlu lagi mengajukan dokumen perizinan secara terpisah ke beberapa lembaga. Serangkaian layanan proses bisnis yang panjang dapat diselesaikan dengan teknologi yang aman bagi pengguna tanpa perlu bertatap muka.

Tidak cukup dengan pengembangan sistem itu, LNSW dituntut lebih agar menjadi *role model* sebagai penggerak transformasi digital layanan terintegrasi sehingga memerlukan dukungan teknologi lainnya.

## Berkenalan dengan Teknologi Blockchain

Dalam pelaksanaannya, INSW terus berkembang dan mengalami pembaruan, baik di sisi layanan maupun sistem. Untuk mendukung perkembangan INSW agar senantiasa menghasilkan ekosistem layanan ekspor, impor, dan logistik yang bermanfaat sebagaimana ditargetkan para pemangku kepentingan, perlu penggunaan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan sistem di masa mendatang.

Dalam lingkup strategis, LNSW perlu merencanakan dan mempertimbangkan pemanfaatan teknologi yang menghasilkan transparansi dalam pertukaran datanya dan membangun kepercayaan dengan kementerian/lembaga dan para pelaku usaha, perusahaan pengurus jasa kepabeanan (PPJK), *shipping line*, serta mitra usaha luar negeri yang berkepentingan akan kualitas sistem yang mampu menjamin integritas data. Di samping itu, untuk memperkuat posisi LNSW dalam pertukaran data, dibutuhkan pemba-

ngunan struktur kesisteman yang aman berdasarkan konsep desainnya.

Pada tahun 2023, LNSW melakukan kegiatan riset dan pengembangan melalui pendanaan riset oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan skema Riset Inovasi Produktif (RISPRO) Invitasi Batch VI Tahun 2022 bertema “Making Indonesia 4.0”, dengan Institut Pertanian Bogor sebagai mitra riset. Kegiatan ini sebagai usaha untuk memperoleh masukan atas teknologi yang dapat membantu pengembangan inovasi baru bagi layanan INSW.

Riset dan pengembangan memperkenalkan LNSW dengan teknologi bernama *blockchain*. Penggunaan *blockchain* ini merupakan usaha yang diharapkan LNSW mampu mendukung tiga tugas utama INSW, yakni *single submission*, *single and synchronous processing*, dan *single decision-making*. LNSW menyadari keberadaan teknologi tersebut kerap menjadi perbincangan para profesional di bidang teknologi maupun pengguna yang berbasis digital.

*Blockchain*, menurut Teguh Prasetyo Utomo dalam tulisannya di *Buletin Perpustakaan* (2021), merupakan teknologi yang memberi alternatif baru dalam upaya memperoleh dan berbagi informasi, yang di dalamnya menawarkan antara lain *peer-to-peer networks* (jaringan *peer-to-peer*), *smart contracts* (kontrak pintar) serta *consensus mechanisms* (mekanisme konsensus) untuk membuat basis data baru. Adapun salah satu teknologi yang menjadi kebutuhan LNSW adalah *smart contract* yang dapat menjalankan tindakan atas kondisi yang telah disepakati pihak-pihak berwenang yang terintegrasi pada sistem. Dengan begitu, proses yang disepakati akan disimpan dalam *blockchain* dan hanya pihak tertentu yang dapat melihat atau mengubah hasilnya.

Platform yang menggunakan *smart contract* memberikan manfaat bagi pihak yang berada dalam jaringan *blockchain*.





Tim Riset Institut Pertanian Bogor memaparkan *progress* riset dan pengembangan teknologi *blockchain* pada proses bisnis *Delivery Order Online* di Ruang Rapat Peta Integritas, Kantor LNSW (21/2/2024).

Untuk membuat suatu perjanjian yang berisi syarat dan ketentuan, antara pihak secara khusus bertemu di antara dua *node*, tanpa ada campur tangan pihak ketiga (Utomo, 2021, h.183). Tentunya hal ini akan memudahkan kesepakatan proses bisnis yang ingin dibuat dengan berbagai pihak yang terintegrasi dalam satu siklus layanan.

Manfaat lain dari *blockchain* adalah tingkat keamanan yang dinilai para ahli cukup sulit untuk diretas. Hal ini membuat LNSW semakin ingin berkenalan dengan teknologi *blockchain* yang kuat dengan penerapan enkripsi dan kriptografi. *Blockchain* juga mendukung beberapa hal dibutuhkan LNSW yang seperti proses *frictionless* dan fungsi pencatatan *log* transaksi.

Proses *frictionless* mendukung adanya satu *single source of truth data* sehingga meningkatkan *trust*, *security*, *transpa-*

*rency*, serta *traceability* terhadap data yang disebar dalam lingkup bisnis yang sama dalam mengimplementasikan arsitektur desentralisasi. Sementara itu, pencatatan *log* transaksi dilakukan untuk meningkatkan *reliability*, *security*, dan *availability* sehingga penyimpanan informasi transaksi dapat akurat dan konsisten.

LNSW pada tahapan awal pengembangan riset ini memanfaatkan layanan *Delivery Order (DO) Online* yang memiliki rantai panjang dalam proses bisnisnya. Rangkaian proses tersebut ideal untuk diujicobakan penggunaan *blockchain* dalam hal pertukaran data informasi ke tiap unit yang berhubungan. Diharapkan, hasil riset itu akan memberi nilai manfaat yang tinggi pada bisnis LNSW khususnya, dan proses bisnis Kementerian Keuangan pada umumnya.

Selain itu, awalan pengenalan teknologi



*blockchain* diharapkan dapat menciptakan purwarupa untuk pengembangan *Government Blockchain* yang bermanfaat bagi penguatan keamanan data pemerintahan.

### INSWChain, Tahapan Baru Sistem INSW

Bukan teknologi namanya jika tidak berkembang dari masa ke masa untuk membantu penyelesaian atau mempermudah pekerjaan manusia. Begitu pula dengan LNSW yang senantiasa melakukan riset agar teknologinya selalu mutakhir sehingga relevan dengan kebutuhan para pengguna jasa layanan INSW.

Sebagaimana pada pembahasan riset *blockchain* tersebut, LNSW mendesain suatu inovasi aplikasi *DO Online* berbasis *blockchain* yang disebut sebagai *Indonesia National Single Window Chain* atau

INSWChain (hak cipta terdaftar). LNSW menargetkan keberlanjutan dari riset *blockchain* dengan mengembangkan INSWChain yang diintegrasikan dengan SINSW.

INSWChain sebagai inovasi terbaru LNSW memiliki potensi yang mampu dikembangkan lebih lanjut pada berbagai layanan proses bisnis INSW. Ke depan, pengembangan INSWChain setelah *DO Online* akan berlanjut pada *Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) Online* dan *Pembayaran SP2*.

LNSW berharap inovasi ini nantinya juga dapat diadopsi oleh pemilik proses bisnis lainnya di lingkup Kementerian Keuangan. Walaupun demikian, pengawasan dan evaluasi INSWChain tetap perlu dilaksanakan untuk memastikan keandalan dan kegunaannya bagi para pemangku kepentingan. ■



# Penghargaan LNSW pada 2024



## APTFF TRADE FACILITATION INNOVATION AWARDS 2024



Oleh  
Hera Khaerani

### Jawara di APTFF Trade Facilitation Innovation Awards 2024

SEPANJANG tahun 2024, Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan meraih sejumlah penghargaan. Berikut ini di antaranya:

MEWAKILI Indonesia dalam ajang Call for Cases: The Asia Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) Trade Facilitation Innovation Awards 2024, LNSW Kementerian Keuangan berhasil menjadi salah satu dari empat pemenang penghargaan. Dewan juri yang beranggotakan Sekretariat APTFF dan pakar dari International Trade Centre (ITC), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), International Chamber of Commerce (ICC), World Customs Organization (WCO), serta Advisory Committee of the United Nations Network of Experts for Paperless Trade and Transport in Asia and the Pacific (UNNEXT), memberikan penghargaan kepada lembaga pemerintah yang mengimplementasikan inovasi dalam fasilitasi perdagangan.

Inovasi yang memenangkan Indonesia dalam ajang tersebut adalah layanan Single Submission (SSm) Pengangkut dalam penyederhanaan rantai pasok berkelanjutan dengan pendekatan Maritime Single Window. Kasus fasilitasi perdagangan yang diterapkan Indonesia guna menjawab tantangan *Sustainable Development Goals* tersebut, diajukan oleh Rotua Nuraini Tampubolon (Analisis Kerja Sama Internasional LNSW) dan Ihsan Andrinah (Analisis Sistem LNSW).

Ketika hadir langsung dalam penyerahan penghargaan di APTFF ke-11 yang diselenggarakan pada 1–5 April 2024 di Samarkand, Uzbekistan, Rotua mempresentasikan bagaimana Indonesia sebagai negara dengan kepulauan yang luas, memiliki tantangan logistik yang signifikan. Namun, dengan penerapan SSm Pengangkut, terwujud efisiensi dari segi waktu, biaya, dan transparansi yang sejalan dengan SDGs. ■



### PPID Tingkat I LNSW Raih Kategori Informatif

PEJABAT Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Lembaga National Single Window meraih penghargaan kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024. Kepala LNSW Oza Olavia hadir langsung menerima penghargaan yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Thomas A.M. Djiwandono di Aula Mezzanine Kemenkeu, pada 6 Agustus 2024 tersebut.

Tahun 2024, dari 12 PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, ada 10 yang meraih kategori Informatif dan dua lainnya meraih kategori Menuju Informatif. LNSW termasuk di antara salah satu PPID Tingkat I yang meraih kategori Informatif.

Capaian ini diraih PPID Tingkat I LNSW setelah empat tahun dijalankan pengelolaan informasi publik oleh unit tersebut. Pencapaian ini tentunya menjadi tanggung jawab besar yang harus terjaga dan senantiasa ditingkatkan. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan agar setiap PPID Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk memberikan informasi yang benar dan berkualitas kepada publik sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan khususnya kepada Kementerian Keuangan, meningkat. ■





## LNSW Peroleh 3 Penghargaan Digitech Award 2024

LNSW memperoleh tiga penghargaan dalam Digital Technology & Innovation (Digitech) Award 2024 yang digelar oleh *IT Magazine* bersama Forum Digital Indonesia BUMN di Hotel Mulia Jakarta, pada 4 April 2024. Digitech Award merupakan ajang penghargaan yang digelar rutin sebagai bentuk apresiasi bagi para tokoh hingga perusahaan yang telah menjadi penggerak transformasi digital di Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital nasional.

Dalam proses penjurian Digitech Awards 2024, LNSW mengangkat bagaimana transformasi digital pada proses logistik dan ekspor-impor berdampak baik pada peningkatan dan kepastian ekonomi Indonesia, serta memberikan kemudahan dan transparansi pelayanan publik ke pelaku usaha, sehingga berdampak efisiensi waktu dan biaya. Ajang yang mengusung tema “Proud to Companies that Have Utilized Digital Technologies to Make a Positive Impact on Society” tersebut, mengantar LNSW menyabet penghargaan The Best IT Governance and The Best Digital Workplace (Government Institution), The Best IT Leadership (Government Institution), serta The Best Chief Information Technology Officer of the Year.

Ajang itu sendiri diikuti oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta kementerian/lembaga yang sukses memanfaatkan transformasi digital agar dapat memberikan nilai tambah signifikan, baik bagi perusahaan secara internal maupun skala nasional dan global.

Dengan keberhasilan meraih penghargaan Digitech Award 2024, LNSW berkomitmen untuk terus konsisten melakukan transformasi digital dalam lingkup ekspor, impor, dan logistik. ■



## Terima Government of The Year dalam ILA 2024

LNSW mendapat penghargaan Government of The Year dalam ajang Indonesia Logistics Awards (ILA) 2024 yang diselenggarakan oleh Supply Chain Indonesia (SCI). ILA merupakan ajang apresiasi bergengsi nasional kepada individu, perusahaan, dan institusi yang menunjukkan prestasi dan kinerja yang unggul serta berkontribusi penting dalam perkembangan logistik nasional.

Sementara itu, SCI merupakan lembaga independen yang bergerak dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, konsultasi, penelitian, dan pengembangan bidang logistik dan *supply chain* di Indonesia. SCI menjadi wadah informasi, interaksi, dan komunikasi para praktisi, akademisi, birokrasi, peneliti, dan pemerhati bidang logistik dan *supply chain* di Indonesia.

LNSW dinilai layak mendapatkan penghargaan Government of The Year dalam ILA 2024 berkat sumbangsih penting dalam peningkatan efisiensi logistik nasional dan daya saing nasional melalui pengelolaan Indonesia National Single Window (INSW) dan penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) sebagai sistem elektronik yang terintegrasi di bidang ekspor, impor, dan logistik.

Direktur Teknologi Informasi LNSW Rachmad Solik hadir langsung mewakili LNSW untuk menerima penghargaan tersebut di Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta pada 10 Oktober 2024. Selain LNSW, penghargaan Government of The Year ini juga diraih oleh Tim Teknis Pengembangan National Logistics Ecosystem yang diwakili oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC Rudy Rahmaddi, serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Penghargaan ini menjadi motivasi LNSW untuk terus berinovasi dan berkontribusi meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang ekspor, impor, dan logistik. ■





## LNSW Raih 3 Penghargaan TOP Digital Awards 2024

LNSW menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam acara puncak TOP Digital Awards 2024 yang diadakan oleh majalah *ItWorks* bekerja sama dengan sejumlah asosiasi ICT dan perusahaan telekomunikasi, juga akademisi dan konsultan IT terkemuka di Tanah Air. Dalam acara penyerahan penghargaan yang berlangsung di Jakarta pada 5 Desember 2024, LNSW meraih Golden Trophy dan kategori Top Digital Implementation 2024 #Level Stars 5. Selanjutnya, Kepala LNSW Oza Olavia dianugerahi Top Leader on Digital Implementation 2024.

TOP Digital Awards 2024 adalah ajang pembelajaran bersama dan pemberian penghargaan tingkat nasional atas keberhasilan inovasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau solusi digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan kepada pelanggan atau masyarakat. Ajang ini telah memasuki tahun ke-9 sejak diselenggarakan pertama kali pada 2016.

Acara TOP Digital Awards 2024 mengangkat tema “Business Solutions, Generative AI, and Cyber Security for Excellence Business and Services”.

Para pemenang penghargaan dipandang telah mampu membuktikan bahwa inovasi, kreativitas, dan terobosan digital yang dilakukan, berdampak signifikan, baik di internal perusahaan maupun hubungan eksternal, termasuk dengan mitra bisnis atau pelanggan dan masyarakat.

Secara umum, Dewan Juri TOP Digital Awards 2024 menilai inovasi digital, terutama sebagai upaya peningkatan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun pencapaian LNSW dalam Top Digital Awards 2024 membuktikan komitmen LNSW dalam akselerasi transformasi digital dan inovasi teknologi informasi. ■

# PPID Tingkat I LNSW

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Sesuai dengan prosedur permintaan informasi publik yang tercantum dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, jalur dan waktu layanan PPID Tingkat I LNSW sebagai berikut:



### Datang langsung

Ruang Layanan PPID, Gedung Syafrudin Prawiranegara II,  
Jl. Lap. Banteng Timur No.2, RT.9/RW.4, Ps. Baru,  
Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710



### e-Mail

ppidlsw@insw.go.id



### Website

<https://e-ppid.kemenkeu.go.id/>  
<https://insw.go.id/>



### Aplikasi mobile PPID

Aplikasi mobile PPID Kemenkeu dapat diunduh melalui Playstore (Android) dan Appstore (IOS)



### Jam Layanan

Senin - Jumat  
Pukul 08.00 - 15.00 WIB





# Loud Budgeting, Hilangkan Gengsi demi Atur Keuangan

Oleh  
**Nindy Ellika Maharani**

**D**i era masifnya penggunaan media sosial yang selalu memunculkan hal-hal baru, pada awal tahun 2024, mencuat suatu tren di bidang keuangan, yaitu *loud budgeting*. Istilah ini ramai diperbincangkan, khususnya oleh kalangan Gen Z, melalui video-video di platform media sosial TikTok.

Dilansir *Bloomberg Technoz*, *loud budgeting* adalah cara mengelola keuangan yang melibatkan penolakan terhadap kesempatan bersosialisasi, seperti makan malam bersama teman atau menghadiri pesta pernikahan di luar kota, demi mencapai tujuan finansial yang lebih besar di kemudian hari. *Loud budgeting* juga membuat orang merasa nya-

man dan terbuka untuk memberi alasan penolakan dengan menyampaikan kondisi finansialnya.

Meskipun terlihat sederhana, menerapkan *loud budgeting* bisa saja sulit dilakukan bagi mereka yang “tidak enakan” untuk menolak ajakan teman atau orang-orang di sekitarnya. Ditambah lagi, keuangan pribadi adalah perkara yang masih dianggap sensitif untuk dibuka di lingkungan sosial. Menolak ajakan juga seringkali menimbulkan rasa bersalah dan *overthinking* tidak akan diajak lagi di kesempatan berikutnya.

Namun, hal-hal tersebut amat mungkin diatasi dengan memegang komitmen penuh akan prioritas keuangan yang sudah disusun sebelumnya agar tujuan finansial bisa tercapai. *Loud budgeting* yang melibatkan kejujuran dan komunikasi yang terbuka mengenai kondisi finansial sebenarnya juga dapat melatih kepercayaan diri dalam menempatkan diri di lingkungan sosial.

Jika suatu ajakan dirasa tidak mengganggu kondisi finansial, tidak ada salahnya untuk menerima ajakan tersebut demi merawat hubungan sosial. Sebaliknya, jika ajakan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu rencana finansial, tidak ada salahnya juga untuk menolak dan memberikan penjelasan kepada si pengajak tentang kondisi keuangan saat ini.

Namun, menolak ajakan hari ini bukan berarti menolak seterusnya. Jika punya keperluan mendesak di bulan ini, bisa jadi tidak di bulan depan. Penolakan saat ini, bisa jadi penerimaan di kemudian hari. Jadi, tidak harus sepenuhnya menolak, kita dapat memberi opsi kepada teman untuk menunda pertemuan jika masih memungkinkan. Jika sudah sepakat agendanya ditunda, kita dapat merencanakan pengeluaran untuk pertemuan tersebut di bulan depan. Atau, jika menunda pertemuan akan sulit mengatur jadwal pengantingnya, kita dapat merekomendasikan tempat yang biayanya lebih terjangkau

sehingga pengeluaran tetap bisa ditekan. Mengatur keuangan adalah hal yang penting, tetapi pertemanan dan relasi sosial juga harus tetap dijaga.

Mengatur keuangan dengan cara *loud budgeting* memfokuskan diri pada tujuan finansial yang realistis dan berkelanjutan. Dengan fokus pada tujuan, kita dapat memberikan batasan-batasan finansial yang jelas kepada orang lain. Kita memegang kendali atas keputusan dalam menentukan pengeluaran.



*Loud budgeting* tidak akan menjauhkan kita dari pertemanan dan lingkungan sosial tapi justru akan memperkuat hubungan pertemanan dari sikap saling terbuka dan mengerti kondisi satu sama lain.”

Metode *loud budgeting* menjadi salah satu dari banyak pendekatan populer untuk mengatur keuangan pribadi terutama dalam hal mengontrol pengeluaran. Tentunya diperlukan keberanian dan kepercayaan diri karena mengharuskan seseorang untuk terbuka tentang kondisi keuangan mereka. Di awal penerapannya, *loud budgeting* mungkin terasa berat. Akan tetapi, dengan berbagi informasi kondisi keuangan secara terbuka kepada teman, akan terbentuk pemahaman yang lebih baik.

*Loud budgeting* juga tidak akan menjauhkan kita dari pertemanan dan lingkungan sosial, tapi justru akan memperkuat hubungan pertemanan dari sikap saling terbuka dan mengerti kondisi satu sama lain. *Loud budgeting* dapat menjadi solusi untuk mengelola keuangan dengan baik dan membangun kesadaran finansial yang sehat di era digital yang selalu berkembang pesat ini. ■



# Petualangan Tak Terlupakan di Raja Ampat

Oleh  
**Rotua Nuraini Tampubolon**

**M**ATAHARI baru saja muncul saat saya tiba di Raja Ampat, sebuah surga tersembunyi di ujung timur Indonesia. Birunya langit dan beningnya air laut langsung menyapa saya lewat keindahannya yang tak terlukiskan. Perjalanan saya kali ini bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan, sebuah kesempatan untuk mengeksplorasi salah satu tempat paling eksotis di muka Bumi.

Setibanya di Bandara Domine Eduard Osok, di kota Sorong, Provinsi Papua Barat, saya langsung menuju Pelabuhan Marina Star. Beranjak menggunakan kapal cepat, saya memulai petualangan dengan mengunjungi Pulau Waigeo, satu dari empat pulau terbesar yang ada di Raja Ampat.

Adrenalin mulai terpacu saat kapal yang saya tumpangi berkali-kali dihantam

kerasnya gulungan ombak lautan lepas Papua. Perut pun mulai terkocok-kocok dan rasa pusing di kepala menemani di sepanjang sisa waktu perjalanan menuju destinasi pertama saya, Geosite Piaynemo.

Sesampainya di spot pertama, tidak serta-merta saya dapat langsung menikmati keindahan pemandangannya. Nyatanya saya masih harus melanjutkan perjuangan dengan menaiki kurang lebih 340 anak tangga untuk bisa sampai ke puncak pemandangan Geosite Piaynemo. Sensasi denyutan di lutut yang semakin intens dan nafas yang semakin tersengal-sengal menjadi tantangan terbesar yang harus saya taklukkan. Namun, begitu tiba di atas puncak, saya langsung tersihir oleh keindahan bentangan laut toska yang tenang, berhias gugusan pulau kecil bak permata hijau di atas permukaan laut. Terbayar sudah rasa lelah yang menyertai di sepanjang awal perjalanan ini.





### Magis di Bawah Laut

Hari berikutnya saya habiskan dengan snorkeling di sekitar Pulau Kri. Pemandangan bawah laut yang menakjubkan segera menyambut begitu saya memasuki air. Ikan-ikan tropis yang berenang bebas ditambah terumbu karang berwarna-warni menciptakan pemandangan yang mengagumkan. Di sela-sela karang, ikan badut bersembunyi pada anemone yang melambai lembut. Pemandangan ini membuat saya merasa seakan berada di dunia magis, dunia yang dipenuhi kehidupan dan keindahan alami. Setiap warna karang dan aksi ikan-ikan yang berenang seolah-olah memiliki kisahnya sendiri, membuat saya terpukau dan ingin menjelajah lagi dan lagi.

Esok hari tiba, waktunya saya berlayar menuju Pulau Misool, salah satu dari empat pulau utama di Raja Ampat. Di sini, terdapat laguna tersembunyi di tengah-tengah tebing karst yang menjulang tinggi. Airnya sungguh jernih sehingga siapapun dapat melihat dasar laguna dengan jelas walaupun kedalamannya bisa mencapai beberapa meter. Di sini saya merasakan hari begitu cepat berlalu. Waktu berjam-jam yang saya habiskan untuk berenang dan menjelajahi gua-gua tersembunyi di balik tebing-tebing tersebut sungguh terasa sejenak. Setiap sudut tempat ini menawarkan panorama yang memesona, dari formasi batuan yang unik hingga kehidupan laut yang beraneka ragam.



“

Di sela-sela karang, ikan badut bersembunyi pada anemone yang melambai lembut. Pemandangan ini membuat saya merasa seakan berada di dunia magis, dunia yang dipenuhi kehidupan dan keindahan alami. Setiap warna karang dan aksi ikan-ikan yang berenang seolah-olah memiliki kisahnya sendiri, membuat saya terpukau dan ingin menjelajah lagi dan lagi.

### Flora dan Fauna yang Memukau

Sehari setelah keseruan di Misool, esok paginya *boat* membawa saya merapat ke salah satu pulau kecil di Raja Ampat. Mendekati pantainya, tampak hamparan hutan hijau hingga ke tepian laut. Pohon-pohon bakau menjulang gagah di atas air, sementara jalinan akar-akarnya memeluk daratan pulau. Dari kejauhan, tampak anggrek liar menggantung di dahan. Pemandangan burung-burung kecil berlompatan dari satu pohon ke pohon lain memanjakan mata saya. Aroma khas hutan basah pun mengisi paru-paru saya, menimbulkan rasa yang sangat menyenangkan.

Langkah kaki terus menuntut untuk berjalan lebih jauh ke hutan. Suara riuh penghuni Pulau Muai terdengar. Saya menangkap kilauan kilauan kuning dan biru terang dari seekor burung cendrawasih yang sedang pamer keelokannya. Ia menari-nari layaknya berada di sebuah pertunjukan balet. Tak jauh dari situ, saya juga mendapati seekor kuskus berbulu coklat tengah memanjat pohon. Sesekali ia menatap ke arah saya dengan matanya yang bulat dan rasa ingin tahu.

Berbicara soal flora dan fauna di Raja Ampat memang tidak akan ada habisnya. Raja Ampat dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Raja Ampat menjadi rumah bagi ribuan spesies penghuni laut, mulai dari terumbu karang berwarna-warni hingga berbagai jenis ikan tropis. Selain itu, Raja Ampat juga merupakan tempat tinggal bagi empat dari tujuh jenis penyu laut di dunia, termasuk penyu hijau dan penyu sisik yang terancam punah.

Begitu juga dengan fauna yang hidup di darat. Lebih dari 186 jenis burung, termasuk burung cendrawasih yang terkenal dengan bulunya yang memukau, menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi ekowisata yang paling menarik di dunia.





### Kekayaan Budaya dan Tradisi Lokal

Tidak hanya alamnya yang indah dan menakjubkan, Raja Ampat juga menyimpan kekayaan budaya. Saya mengunjungi desa-desa lokal dan berinteraksi dengan para penduduk asli yang ramah. Dengan bangga dan penuh semangat, mereka menunjukkan tarian tradisional serta kerajinan tangan yang mereka buat sendiri. Ini menambah wawasan saya tentang budaya dan tradisi mereka yang khas. Selain itu, saya juga belajar tentang bagaimana mereka dapat hidup berdampingan dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan, namun dengan tetap mempertahankan tradisi dan budaya yang mereka miliki.

Ada satu momentum yang paling berkesan bagi saya. Ketika itu, saya diajak untuk menyaksikan langsung upacara adat yang ada di salah satu desa. Upacara ini dilaksanakan untuk merayakan panen laut yang melimpah. Seketika itu saya merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perayaan tersebut. Para penduduk desa memakai pakaian tradisional

mereka yang unik dan indah. Diiringi musik dan tarian, semua bersuka cita. Saya merasa terhubung dengan mereka meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda.

Perjalanan saya di Raja Ampat ditutup oleh pemandangan matahari terbenam di atas Pulau Waigeo. Langit yang semula biru perlahan-lahan berubah menjadi oranye dengan semburat merah muda, menciptakan panorama yang indah sekaligus menenangkan. Saat itu, saya merasa amat bersyukur berkesempatan menjelajahi tempat yang luar biasa ini.

Pergi ke Raja Ampat bukan sekadar pelesiran ke suatu destinasi wisata, melainkan juga sebuah pengalaman yang menorehkan cerita hidup. Keindahan alamnya yang menakjubkan serta keramahan penduduknya meninggalkan kesan mendalam yang akan senantiasa saya kenang. Setiap sudutnya adalah harta tak ternilai bagi bangsa kita. Setiap detik dari perjalanan ini mengajarkan saya untuk lebih menghargai alam dan budaya serta terus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. ■



## INSW Mobile v.2.0

hadir dengan mempertahankan layanan yang sudah ada ditambah dengan fitur baru sebagai berikut:

- Tampilan Baru
- Tracking Layanan Permohonan INSW
- Layanan Pusat Notifikasi
- Info Pengumuman INSW
- Update Foto Profile
- Update Data Profile
- Summary Permohonan Layanan INSW
- Bugfixing







[www.insw.go.id](http://www.insw.go.id)



LNSWKemenkeu



officialinsw



Lembaga National  
Single Window